

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM  
KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN  
KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT  
KOTA SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

**Disusun Oleh :**

**Afwah Ulya**

**(131411011)**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2018**



## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Afwah Ulya

NIM : 131411011

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/ Konsentrasi : PMI/ Kesehatan Lingkungan

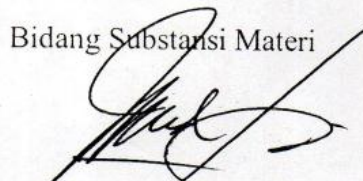
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan mohon untuk segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bidang Substansi Materi


  
Drs. H.M. Mudhofi, M.Ag

NIP. 19690830 199803 001

Semarang , 12 Juli 2018

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis

  
Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si.

NIP.19760510 200501 2 001



SKRIPSI

Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan  
Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Disusun Oleh:


Afwah Ulya

131411011

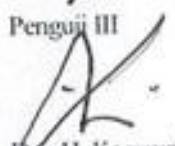
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 24 Juli 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I

  
Dr. H. Fachrur Rozi, M. Ag.  
NIP. 19690501 199403 1 001

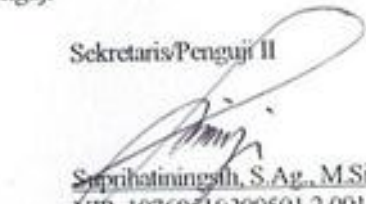
Penguji III

  
Drs. H. Kasnuri, M. Si.  
NIP. 19660822 199403 1 003

Pembimbing I

  
Drs. H. Mudhofi, M. Ag.  
NIP. 19690830 199803 1 001

Sekretaris/Penguji II

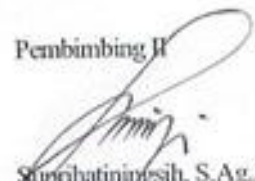
  
Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760510200501 2 001

Penguji IV

  
Drs. Sugiarso, M.Si.  
NIP. 19571013 198601 1 001

Mengetahui

Pembimbing II

  
Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760510200501 2 001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

tanggal 2 Agustus 2018



Dr. H. Awaludin Vimay, Lc, M.Ag

NIP. 19610727 200003 1 001



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Agustus 2018



Afwah Ulya  
NIM: 131411011





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkah dan limpahan nikmat serta rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang”** dapat penulis selesaikan.

Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Suprihatiningsih, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Jurusan PMI dan sekaligus dosen pembimbing II yang memberikan pengarahan-pengarahan dalam mengajukan judul hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. M. Mudhofi., M.Ag selaku Dosen pembimbing I yang berkenan membimbing dengan keikhlasan dan kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan di lingkungan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, atas segala ilmu, bimbingan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.
6. Lurah Krobokan, Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan masyarakat Krobokan yang telah memberikan izin melakukan penelitian sehingga memberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Titik selaku Manager BKM Arta Kawula yang selalu meluangkan waktunya, sabar, memberikan dukungan dan do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Ahmad Rifai dan ibunda tercinta Sunawati yang telah mengiringi dengan do'a, memberikan kasih sayang dan didikan yang tegas serta saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan do'a kepada penulis.
9. Sahabatku Hikmatul Qoidah, Indah Nur Fitriyaningsih dan Riski Choironi yang tak pernah lelah dalam memotifasi, membantu dan menemani dalam proses penyelesaian karya ini.
10. Teman - teman seperjuangan di jurusan PMI UIN Walisongo yang telah membantu, menemani selama melaksanakan pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo, senang bisa mengenal kalian.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini menjadi ibadah di sisi-Nya. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, 10 Agustus 2018

**Afwah Ulya**  
**131411011**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT, dengan ketulusan dan kerendahan hati.

Ku panjatkan rasa syukur atas semua karunia-Mu kepadaku sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Ku persembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda Ahmad Rifai dan Ibunda Sunawati tercinta.
2. Kakak Sofi A'la dan Adik Choffah Aulia



## **MOTTO**

Inspirasi menjadi kunci, agar semua mau berpartisipasi. Bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdikan tanpa henti.

(Najwa Shihab)





## **ABSTRAK**

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan permukiman kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah suatu upaya strategis pemerintah dalam menangani permukiman kumuh di Indonesia. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam pencapaian sasaran program KOTAKU. Program KOTAKU tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat.

Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer skripsi ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu data utama yang diperoleh dari fasilitator program KOTAKU, BKM Arta Kawula, Kelurahan Krobokan dan masyarakat Kelurahan Krobokan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip-arsip, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, catatan-catatan, dokumen, foto dan sumber online maupun data pendukung lain. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan tiga tahapan yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian/paparan data; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU, yaitu:(1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan melalui masyarakat ikut

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi dan waktu dalam pelaksanaan program pada musyawarah atau rapat; (2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan melalui sumbangan pemikiran, sumbangan materi dan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program KOTAKU; (3) partisipasi masyarakat dalam evaluasi, wujud nyata dalam tahap ini dibuktikan melalui masyarakat khususnya Tim Inti Perencana Partisipatif mengevaluasi dari hasil pembangunan serta mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program KOTAKU; (4) partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan dengan manfaat yang diambil setelah pelaksanaan program KOTAKU seperti berkurangnya debit air pada saat hujan. Setelah menganalisa data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa faktor pendukungnya adalah Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program. Sedangkan faktor penghambat dalam partisipasi ini adalah masyarakat masih kurang sadar akan berpartisipasi dan kebiasaan masyarakat akan mengharapkan imbalan dalam melakukan serangkaian proses Program KOTAKU.

**Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Kota Tanpa Kumuh**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
DATAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sumber dan Jenis Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	21

4. Teknik Analisis Data .....	24
-------------------------------	----

## BAB II : KERANGKA TEORITIK

A. Partisipasi Masyarakat .....	28
1. Pengertian Partisipasi .....	28
2. Pengertian Masyarakat .....	32
3. Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	38
4. Tahapan – tahapan Partisipasi .....	43
5. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat.....	45
6. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	47
7. Tipologi Partisipasi .....	50
8. Tingkatan Partisipasi .....	53
9. Pemberdayaan Masyarakat.....	56
B. Tinjauan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .....	59
1. Program KOTAKU dan Definisi Kumuh.....	59
2. Tujuan Program KOTAKU .....	63
3. Lokasi Sasaran Program KOTAKU.....	64
4. Strategi Program KOTAKU .....	65

5. Tahapan Penyelenggaraan Program KOTAKU .....	67
BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTAKU di Kelurahan Krobokan	
A. Gambaran Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.....	91
B. Gambaran Umum Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan .....	101
1. Wilayah Kumuh di Kelurahan Krobokan.....	103
2. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan.....	108
3. Tahapan Penyelenggaraan Program KOTAKU .....	111
C. Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU.....	120
1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....	122
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan.....	125

3. Partisipasi Masyarakat dalam monitoring dan evaluasi.....	127
4. Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan manfaat.....	130

**BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU.....	135
B. Analisis faktor pendukung dan faktor penghambat Partisipasi Masyarakat di Krobokan.....	154

**BAB V : PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	157
2. Saran .....	159
3. Penutup .....	160

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin .....	94
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan .....	96
3. Tabel 3 Jumlah Lembaga Pendidikan .....	97
4. Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	98
5. Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Agama ..	100
6. Tabel 6 Permukiman Kumuh Menurut Badan Pusat Statistik.....	101
7. Tabel 7 Wilayah Kumuh Kelurahan Krobokan.....	104
8. Tabel 8 Pelaksanaan Program KOTAKU .....	109

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1 Kolaborasi Program KOTAKU .....	61
2. Gambar 2 Peta Kelurahan Krobokan .....	92
3. Gambar 3 Pelatihan Kapasitas Masyarakat.....	107
4. Gambar 4 Pamflet Program KOTAKU.....	116



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menangani fenomena perumahan dan pemukiman kumuh, maka dibutuhkan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Keterlibatan pemerintah dengan cara membuat program kegiatan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Harapannya agar dapat mengikutsertakan semua kelompok ataupun individu masyarakat dalam kelompok kehidupan bermasyarakat dan dapat membantu memberdayakan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia.<sup>1</sup> Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian dari tujuan, dimana partisipasi

---

<sup>1</sup> Teraik Koyoga, Benu Olfie dan Olly Ersy Laoh, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua", dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 No.2 Juni 2015.

masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa.

Lin Herlina juga menambahkan bahwa keuntungan lain dari partisipasi masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas proyek.<sup>2</sup>

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan pemukiman yaitu peningkatan kualitas pemukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> Lin Herlina, *Partisipasi sebagai Salah Satu Determinan dalam Pembangunan Desa*, (ITB: Tesis, 2003), hlm. 4.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha<sup>3</sup> pemukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan pemukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Tujuan dari program KOTAKU ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya berinisiatif dan meresmikan pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019. Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan pemukiman layak huni di antaranya

---

<sup>3</sup>Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015.

adalah melalui peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

BKM salah satu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif. Menurut Kusumo, BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya. Dalam melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat, BKM menumbuhkembangkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat sebagai media belajar masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan secara mandiri. Fungsi BKM adalah sebagai wadah sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Badan ini memfasilitasi kebutuhan dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada atau masyarakat miskin pada umumnya untuk dapat

terus tumbuh, berkembang jaringan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya.<sup>4</sup>

BKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga desa/kelurahan serta memperjuangkan warga di tingkat kelurahan/desa dalam musbangdes. BKM juga sebagai peran utama dalam menjalankan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat warga penerima manfaat. Salah satunya adalah BKM Arta Kawula yang berada di Kelurahan Krobokan. Kelurahan Krobokan setiap tahun selalu menjadi sasaran penerima program dari pemerintahan mulai dari Program PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2008-2014, P2KP hingga saat ini dalam proses pelaksanaan Program KOTAKU dimulai tahun 2015 sampai sekarang.<sup>5</sup>

KOTAKU adalah program yang di laksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi yang menjadi basis penanganan pemukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya manusia maupun sumber pendanaan termasuk dari pemerintah pusat,

---

<sup>4</sup> Kurnia Wijayanti, dkk., “Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat” dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 10, hlm. 35.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada Tanggal 28 Maret 2018.

provinsi, Kabupaten/Kota, donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam lebih tepat menggunakan bentuk *da'wah bi al-hal* karena lebih menekankan aspek pelaksanaan suatu program kegiatan. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan erat menyangkut perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan. Prinsip pembangunan masyarakat Islam adalah holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan, eksistensi komponen alam termasuk lingkungan bukan hanya manusia. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya merubah masyarakat tradisional, miskin, terbelakang dan tidak beriman menuju masyarakat modern yang maju, kreatif, beriman dan bertakwa.<sup>6</sup> Namun kenyataan yang ada di lapangan kebersihan lingkungan masih menjadi masalah karena sebagian masyarakat masih ada yang berperilaku tidak ramah lingkungan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Kamaluddin, "Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam", Dalam *Jurnal Konsep Dasar dan Arah Pengembangan*. Vol. VIII. No. 02. Juli 2014.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.*<sup>7</sup>

Pada surat Ar-Ruum ayat 41 dapat dianalisa bahwa ayat ini mengharapkan seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Dengan artian jika akan melakukan sesuatu harus melalui pertimbangan pemikiran yang matang akan akibat yang ditimbulkannya agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak lingkungan.

Wilayah kumuh Kota Semarang saat ini seluas 361,498 Ha. Pada tahun 2015 pemerintah telah

---

<sup>7</sup> Al-Bayan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy Syifa', 2013), hlm. 1092.

menangani wilayah kumuh di 16 kelurahan. Kelurahan tersebut yakni: Rejomulyo (8,43 Ha), Kemijen (4,33 ha), Tambakrejo (1,03 Ha), Kaligawe (4 Ha), Purwodinatan (5 Ha), Kuningan (1,5 Ha), Bandarharjo (1,8 Ha), Tanjungmas (7,5 Ha), Krobokan (6,6 Ha), Trimulyo (3 Ha), Genuksari (2,10 Ha) Penggaron Kidul (1,50 Ha), Lamper Lor (1,20 Ha), Sekaran (1,55 Ha), Jabungan (3,58 Ha), dan Gedawang (1,24 Ha).<sup>8</sup>

Salah satu wilayah sasaran KOTAKU adalah Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh Pemerintah bahwa Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dikategorikan sebagai wilayah pemukiman kumuh karena kondisi rumah-rumah di Kelurahan ini belum sepenuhnya terlayani dengan fasilitas pelayanan seperti jalan berlubang, tidak terpeliharanya drainase, sistem pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga banyak sampah yang berserakan di pinggir saluran drainase. Selain itu, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai

---

<sup>8</sup> Sukadi, *Kawasan Kumuh Kota Semarang*, <http://www.iklansuaramerdeka.com/kawasan-kumuh-berkurang-543-ha/> diakses pada 7 Juli 2018.



dengan standar teknis yang berlaku. Kondisi ini dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau pemukiman tidak memiliki sistem yang memadai yang terhubung dengan tangki septik.<sup>9</sup> Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat merupakan salah satu wilayah yang fokus menjadi target Program KOTAKU. Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat mempunyai wilayah kumuh seluas 16,16 Ha yang tersebar di RW 7 sampai RW 13.<sup>10</sup> Alasan memilih lokasi ini karena Kelurahan Krobokan memiliki potensi sosial yang besar seperti kegotong-royongan, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain yang cukup baik untuk memperbaiki masalah infrastruktur pada lingkungan Kelurahan Krobokan yang bertujuan untuk melancarkan akses ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

KOTAKU diharapkan menjadi platform kolaborasi yang mendukung penanganan pemukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Ahwan pada Tanggal 28 Maret 2018.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi Pujiastuti pada Tanggal 28 Maret 2018.

perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat dasar di tingkat kota maupun desa serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu Program KOTAKU.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan Program KOTAKU. Selain sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan Program KOTAKU juga merupakan pencerminan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam wujud pembangunan juga lebih fokus perhatian pada aspek manusia dan lingkungan agar manusia bisa nyaman dengan lingkungan yang bersih dan layak huni.

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016), hlm. 3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat?
2. Apasaja faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik bagi pihak penulis maupun bagi pengembangan ilmu dan

pengetahuan secara akademik. Secara lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Untuk menambah wawasan teorik bagi mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian serupa dimasa mendatang.
2. Manfaat praktis:
  - a. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam hal ini Kementerian Perumahan dan pemukiman untuk menjalankan Program perbaikan infrastruktur khususnya perncegahan permukiman kumuh.
  - b. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis juga mengacu pada referensi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain sebagai acuan, tinjauan pustaka ini juga untuk

menghindari terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadjar Judiono dalam Jurnal Wacana Vol. 12 No. 3 Juli 2009 yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Jalan, Studi Kasus Peningkatan Jalan di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk*. Penelitian ini membahas tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan prasarana jalan dan proses pelaksanaan pembangunan prasarana jalan yang berorientasi pada kepentingan dan partisipasi masyarakat. Adapun tahapan tersebut adalah tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan program, tahap pengambilan manfaat dan tahap evaluasi. Proses pelaksanaan pembangunan prasarana jalan yang berorientasi pada kepentingan dan partisipasi masyarakat adalah proses pelaksanaan pembangunan yang memberikan otoritas sebesar-besarnya pada masyarakat sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan lain yang dapat mendukung kelancaran program.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akbar Putra Siregar dan Robert Tua Siregar dalam Jurnal *Regional Planning* Vol. 4 No. 2 edisi Agustus pada tahun 2015 yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalumun Provinsi Sumatra Utara*. Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, kendala pengaruh partisipasi masyarakat serta upaya pemerintah Kecamatan Tanah Jawa dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat tersebut cukup antusias dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanah Jawa. Adapun kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pola pikir masyarakat itu sendiri yang beranggapan bahwa segala program pembangunan tersebut merupakan proyek bagi pemerintah, tingkat

---

<sup>12</sup> Fadjar Judiono, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Jalan, Studi Kasus Peningkatan Jalan di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk”, dalam *Jurnal Wacana* Vol. 12 No. 3 Juli 2009.

pendidikan masyarakat yang masih rendah serta pendapatan masyarakat yang masih rendah.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuniani dan Gusty Putri Dhini Rosyida, dalam jurnal *Wacana Publik* Vol. 1 No. 2 pada tahun 2017 yang berjudul *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surabaya*. Penelitian ini membahas tentang proses kolaborasi dalam perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Semanggi Kota Surakarta serta hambatan yang terjadi. Kolaborasi yang terjadi dalam perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dimana harusnya berjalan dengan menggunakan konsep kolaborasi sesuai dengan SE DJCK No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU tidak semua Prinsip berjalan sebagaimana semestinya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Akbar Putra Siregar dan Robert Tua Siregar, “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalumun Provinsi Sumatra Utara”, dalam *Jurnal Regional Planning* Vol. 4 No. 2 edisi Agustus 2015.

<sup>14</sup>Sri Yuniani dan Gusty Putri Dhini Rosyida, “Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surabaya”, dalam *Jurnal Wacana Publik* Vol. 1 No. 2. Tahun 2017.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sahria Apriliana dalam *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 1 pada tahun 2018 yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)*. Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan drainase dan sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan. Partisipasi yang dilakukan adalah partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dan yang terakhir adalah partisipasi dalam tahapan evaluasi hasil pembangunan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Kotaku yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya ketidakhadiran masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sahria Apriliana, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)*” dalam *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 1. Tahun 2018.



Kelima, skripsi Indah Nur Fitrianiingsih mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang yang berjudul *Model Pengembangan Masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Krajan Kulon, Kaliwungu Kendal*. Skripsi ini membahas tentang model pengembangan masyarakat dan pelaksanaan model pengembangan masyarakat melalui KOTAKU. Pada tahapan pelaksanaan menggunakan model perencanaan sosial. Sedangkan tahap pelaksanaan menggunakan model pengembangan aksi sosial yang menekankan pada tujuan, proses dan hasil melalui penyadaran, pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan seperti pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat dan pelatihan relawan.<sup>16</sup>

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Suroso, Abdul Hakim, Irwan Noor dalam Jurnal Wacana Vol.17 No.1 pada tahun 2017 yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran*

---

<sup>16</sup> Indah Nur Fitrianiingsih, *Model Pengembangan Masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Krajan Kulon, Kaliwungu Kendal*, (UIN Walisongo Semarang: Skripsi, 2017).

*Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik.* Penelitian ini membahas tentang derajat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes Desa Banjaran. Partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes Desa Banjaran masih relatif sedang karena keaktifan partisipasi relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan masyarakat dalam memberikan data, minimnya usulan yang datang dari warga serta masih adanya respon pasif dari peserta musyawarah rembuk bangun desa.<sup>17</sup>

Dari penelitian-penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU, akan tetapi penelitian tentang partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU masih layak diteliti karena sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian Program KOTAKU di wilayah Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Penelitian ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat pada Program KOTAKU serta mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor

---

<sup>17</sup> Hadi Suroso, dkk, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik", dalam *Jurnal Wacana* Vol. 17 No.1 pada tahun 2017.

pendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang saya digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi

---

<sup>18</sup> Lex J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 1993), hlm. 3.

partisipasi masyarakat Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat terhadap program yang dijalankan oleh KOTAKU.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.<sup>19</sup>

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikelompokkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm. 186.

sumber seperti arsip-arsip, buku, laporan, jurnal, dokumen, foto dan lain-lain.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Berdasarkan sumber dan jenis data di atas, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>20</sup> Menelitinya dengan menggunakan sebuah metode non partisipan, yaitu sebuah penelitian dimana penulis tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan program KOTAKU yang dilakukan selama penelitian.

Penulis hanya mengamati partisipasi masyarakat di Kelurahan Krobokan, pemangku kebijakan di Kelurahan Krobokan, BKM Arta Kawula yang menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta fasilitator Program KOTAKU dalam

---

<sup>20</sup> Usman Husaini dan Akbar Setia Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

menjalankan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Dalam hal ini penulis hanya mengamati sebuah proses aktifitas masyarakat dalam menjalankan program KOTAKU seperti masyarakat yang sedang bergotong royong, mengikuti rapat, membuat peta swadaya masyarakat, membuat drainase dan perbaikan jalan serta partisipasi ibu-ibu rumah tangga yang membuat makanan untuk diberikan kepada masyarakat yang melakukan gotong-royong.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).<sup>21</sup> Metode pengumpulan data dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau sumber data. Tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 79.

wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menanyakan apa saja dan pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh seorang informan.<sup>22</sup>

Penulis melakukan interview dengan pertimbangan peneliti ingin memperoleh data secara langsung dari informan sehingga kebenaran sesuai dengan fakta dan tidak diragukan lagi. Data yang ingin diperoleh mengenai proses partisipasi masyarakat serta perubahan setelah adanya program KOTAKU dengan bertanya langsung kepada warga masyarakat yang menjadi partisipan sehingga kemungkinan adanya manipulasi data bisa diperkecil.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan melengkapi data dari bidang keilmuan yang meliputi buku, majalah, surat kabar, artikel jurnal yang memiliki korelasi

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Reasearch Sosial*, (Bandung: Alfa Beta, 1997), hlm. 29.

dengan tema kajian yang akan dibahas.<sup>23</sup> Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini dokumentasi diambil dari arsip-arsip dan foto-foto program KOTAKU di Krobokan.

#### **4. Teknik Analisis Data.**

Sesuai dengan subjek penelitian partisipasi masyarakat maka hal tersebut akan dikemukakan di sini, menurut Bogan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfa Beta, 2009), hlm. 88.



Analisis data adalah sebuah proses mengurutkan data-data yang ada dan mengorganisasikan dengan pola kategori suatu uraian data dasar sehingga dapat ditemukan sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data.<sup>25</sup>

Miles dan Huberman (1992) sebagaimana yang dikutip Imam Gunawan mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian/paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).<sup>26</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini merupakan sebuah proses yang berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Karena tujuan dilakukannya proses ini adalah

---

<sup>25</sup> Moelox Laxi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data. Maka hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan. Penulis melakukan pemilihan dan penelaan dalam kategori tertentu secara keseluruhan data yang dihimpun di lapangan mengenai pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

b. Penyajian data

Menurut Milles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 148.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah dimulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal tersebut merupakan langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Partisipasi**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Made Pidarta dalam Dwiningrum partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.<sup>1</sup> Menurut Tjokroamidjojo, partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan.<sup>2</sup> Menurut Mikkelsen dalam buku “Intervensi Komunitas” menyatakan bahwa partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat

---

<sup>1</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2011), hlm. 50.

<sup>2</sup> Taliziduhu Ndhara, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 14.

dalam suatu pembangunan tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

Menurut Loekman Soetrisno,<sup>4</sup> ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat. Definisi pertama, adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat dalam pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Definisi kedua yang berada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Notoatmodjo dalam Budiardjo juga mengungkapkan bahwa dalam partisipasi anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau

---

<sup>3</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 106.

<sup>4</sup> Loekman Sutrisna, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 222.

sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (Pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda seperti kayu, bambu, beras, batu dan lain sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan).<sup>5</sup> Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff (1997) dalam Dwiningrum, partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi.<sup>6</sup>

Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat. Sedangkan di kamus sosiologi menyebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 28.

<sup>6</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Op. Cit*, hlm. 51

kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.<sup>7</sup>

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tak lepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang merupakan wujud dari pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan mengevaluasi program.

---

<sup>7</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), hlm. 81-82

## 2. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “*syakara*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*Musyaraka*” yang berarti bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dari bahasa latin “*socius*” yang berarti kawan.<sup>8</sup>

Melville J. Herkovits menyatakan bawa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup baru. Sedangkan Koentjaraningrat merumuskan definisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia yang dengan sendirinya saling memengaruhi satu sama lain.<sup>9</sup>

Abdul Syani<sup>10</sup> menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri.

---

<sup>8</sup> Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 37 .

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 146.

<sup>10</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok Masyarakat Sosial*, (Jakarta: Fajar Agung, 2012), hlm. 31.



Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

J.L. Gillin dan J.P. Gillin menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai tradisi, kebiasaan, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Dalam hal ini, masyarakat meliputi pengelompokan-pengelompokan kecil.

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Ciri-ciri masyarakat pada umumnya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Setiap anggota masyarakat menyadari dirinya sebagai satu kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan

---

<sup>11</sup> Abdul Syani, *Op..Cit.*, hlm. 32.

karena masing-masing merasa dirinya berkaitan satu dan lainnya.

Adapun unsur masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok (pengumpulan) manusia yang banyak jumlahnya.
- b. Berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.
- c. Aturan yang mengatur bersama untuk maju menuju satu cita-cita yang sama.
- d. Interaksi antara warganya.
- e. Suatu identitas diantara para warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan manusia yang lainnya.

Selo Soemardjan<sup>12</sup> mengelompokkan masyarakat berdasarkan ciri-ciri struktur sosial dan budayanya sebagai berikut:

1. Masyarakat sederhana. Ciri-ciri masyarakat sederhana:

---

<sup>12</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: YBP-FEUI, 1974), hlm. 90.

- a) Ikatan keluarga dan masyarakatnya sangat kuat.
  - b) Organisasi sosial berdasarkan tradisi turun-temurun.
  - c) Memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan gaib.
  - d) Hukum yang berlaku tidak tertulis.
  - e) Sebagian besar produksi hanya untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran dalam skala kecil.
  - f) Kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan dengan gotong-royong.
2. Masyarakat Madya. Ciri-ciri struktur sosial dan budaya pada masyarakat madya adalah:
- a) Ikatan keluarga masih kuat tetapi hubungan dengan masyarakat setempat sudah mengendur.
  - b) Adat-istiadat masih dihormati tetapi mulai terbuka terhadap pengaruh dari luar.
  - c) Timbulnya rasionalita dalam cara berpikir sehingga kepercayaan pada kekuatan gaib timbul apabila mereka sudah tidak dapat

berpikir logis dalam memecahkan suatu masalah.

- d) Timbulnya lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat lanjutnya.
  - e) Hukum tertulis mulai menampangi hukum tidak tertulis.
  - f) Memberi kesempatan pada produksi pasar sehingga muncul diferensiasi dalam struktur masyarakat.
3. Masyarakat Modern. Ciri-ciri struktur sosial dan budaya masyarakat modern adalah:
- a) Hubungan sosial didasakan atas kepentingan pribadi
  - b) Hubungan dengan masyarakat lainnya sudah terbuka dan saling mempengaruhi.
  - c) Kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kuat.
  - d) Terdapat stratifikasi sosial atas dasar keahlian.
  - e) Tingkat pendidikan formal tinggi.
  - f) Hukum yang berlaku adalah hukum tertulis.

g) Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat pembayaran lain.

Adapun yang menjadi faktor manusia hidup bermasyarakat adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Hasrat yang berdasarkan naluri (kehendak biologis yang di luar penguasaan akal) untuk mencari teman hidup.
2. Kelemahan manusi ayang sangat mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang diperoleh dengan cara berserikat dengan orang lain sehingga dapat berlindung bersama-sama dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama.
3. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau mencari teman untuk hidup bersama dari pada hidup sendiri.

---

<sup>13</sup> Herabudin, *Pengantar Sosioogi*, (Bandung: Pustaka Setia, ), hlm. 76.

4. Bergson berpendapat bahwa manusia hidup bersama bukan karena persamaan, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat kedudukan dan sebagainya.
5. Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan, cita-cita, kesamaan kebudayaan, dan lain sebagainya.

### **3. Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi menurut Efendi, bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi

semacam ini merupakan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.<sup>14</sup>

Menurut Basrowi,<sup>15</sup> partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan seperti usaha-usaha pembangunan rumah, pembangunan jalan, membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Dusseldorp dalam buku pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi kegiatan partisipasi

---

<sup>14</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Op. Cit*, hlm. 58.

<sup>15</sup> Basrowi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Desa Girigono dan Kembang Kuning Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 16.

yang dilakukan oleh setiap masyarakat dapat berupa:<sup>16</sup>

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Yadav dalam Theresia, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:<sup>17</sup>

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan

---

<sup>16</sup> Totok Mardikanto, *Op.Cit*, hlm. 84.

<sup>17</sup> Theresia Aprilia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm. 198-199.



alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah melibatkan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Ndraha bentuk partisipasi meliputi:<sup>18</sup>

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, memenuhi, melaksanakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.

---

<sup>18</sup> Taliziduhu Ndara, *Op.Cit.*, hlm. 103-104.

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **4. Tahapan-tahapan Partisipasi**

Cohen dan Uphoff membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada saat perencanaan suatu kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Dalam redaksi yang lain, yang dipaparkan oleh Yadav, yang dikutip oleh Totok Mardikanto. Tahapan-tahapan partisipasi masyarakat yaitu :<sup>19</sup>

1. Partisipasi dalam mengambil keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program dan proyek-proyek pembangunan.

---

<sup>19</sup> Totok Mardikanto, *Op.Cit.*, hlm. 79.

4. Partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan.

## 5. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat adalah:<sup>20</sup>

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
2. Aspek-aspek tipologis
3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
4. Demografis (jumlah penduduk)
5. Ekonomi (desa miskin atau tertinggal)

Sementara Solekan<sup>21</sup> mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

1. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat bagi individu maupun

---

<sup>20</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>21</sup> Muchamaad Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 135.

kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna tempat saja tetapi juga forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes), namuun dalam pelaksanaanya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrebangdes menjadi tidak mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## 2. Melemahnya modal sosial

Menurut Bardhan, modal sosial merupakan serangkaian nirma, jaringan dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi

informal seperti arisan, jamaah tahlil dan lain sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

## **6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program, sifat faktor-faktor ini bisa mendukung program yang sukses, tetapi ada juga sifat dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya, faktor usia, yang terbatas properti, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Angell mengatakan bahwa partisipasi berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

### **1. Usia**

Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan masyarakat yang ada. Orang dari

kelompok usia menengah dengan lampiran moral terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang lebih stabil, cenderung lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan kelompok usia lainnya.

## 2. Jenis Kelamin

Nilai panjang dominan dalam budaya berbagi bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya sebagai wanita adalah “di dapur” yang berarti bahwa di banyak masyarakat peran perempuan, terutama mengurus rumah tangga, tetapi nilai bagi peran perempuan telah bergeser oleh gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan, semakin baik.

## 3. Pendidikan

Dikatakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungan, sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.



#### 4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Memahami bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana ekonomi yang stabil.

#### 5. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan akan mempengaruhi partisipasi seseorang. Semakin lama masyarakat tinggal di lingkungan tertentu, rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasi besar dalam aktivitas apapun yang lingkungan.

## 7. Tipologi Partisipasi

Menurut Totok Mardikanto, ada beberapa tipologi partisipasi, yaitu:<sup>22</sup>

### 1. Partisipasi pasif atau manipulatif.

Partisipasi jenis ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.

### 2. Partisipasi informatif.

Disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi tidak dibahas bersama masyarakat.

### 3. Partisipasi konsultatif.

---

<sup>22</sup> Totok Mardikanto, *Op.Cit.*, hlm. 88.

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan serta menganalisa masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi insentif.

Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

5. Partisipasi fungsional.

Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.

## 6. Partisipasi interaktif.

Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

## 7. Partisipasi Mandiri (*self mobilization*).

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumber daya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan.

Slamet dalam Totok menyatakan bahwa tumbuh dan berkeembangnya pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu.<sup>23</sup>

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpatisipasi dalam suatu kegiatan.
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

## **8. Tingkatan Partisipasi**

Wilcox dalam Theresia, mengemukakan adanya lima tingkatan partisipasi, yaitu:<sup>24</sup>

1. Memberikan informasi
2. Konsultasi, yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 86.

3. Pengambilan keputusan bersama. Dalam hal ini memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama. Dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan. Dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Secara khusus Peter Oakley dalam Dwiningrum<sup>25</sup> memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan berikut:

1. *Manipulation*

Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indokrinasi.

---

<sup>25</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Op. Cit.*, hlm.65.

2. *Consultation*

Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.

3. *Consensus building*

Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahannya adalah individu-individu atau kelompok yang masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.

4. *Decision building*

Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.

5. *Risk-taking*

Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implementasi. Pada

tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.

6. *Partnership*

Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.

7. *Self management*

Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

**9. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya membangun sumber daya dan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki



serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>26</sup>

Beberapa tujuan pemberdayaan yaitu:<sup>27</sup>

a. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

---

<sup>26</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Jakarta:BPFE, 2000), hal: 263

<sup>27</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, ( Bandung: Alfabeta) hlm: 111-112

d. Perbaiki kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring mitra usaha.

e. Perbaiki usaha (*better bussines*)

Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaiki pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaiki lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaiki kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki

keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

## **B. Tinjauan tentang Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

### **1. Program KOTAKU dan Definisi Kumuh**

Program KOTAKU adalah suatu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100. Gerakan 100-0-100 merupakan 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak pakai.

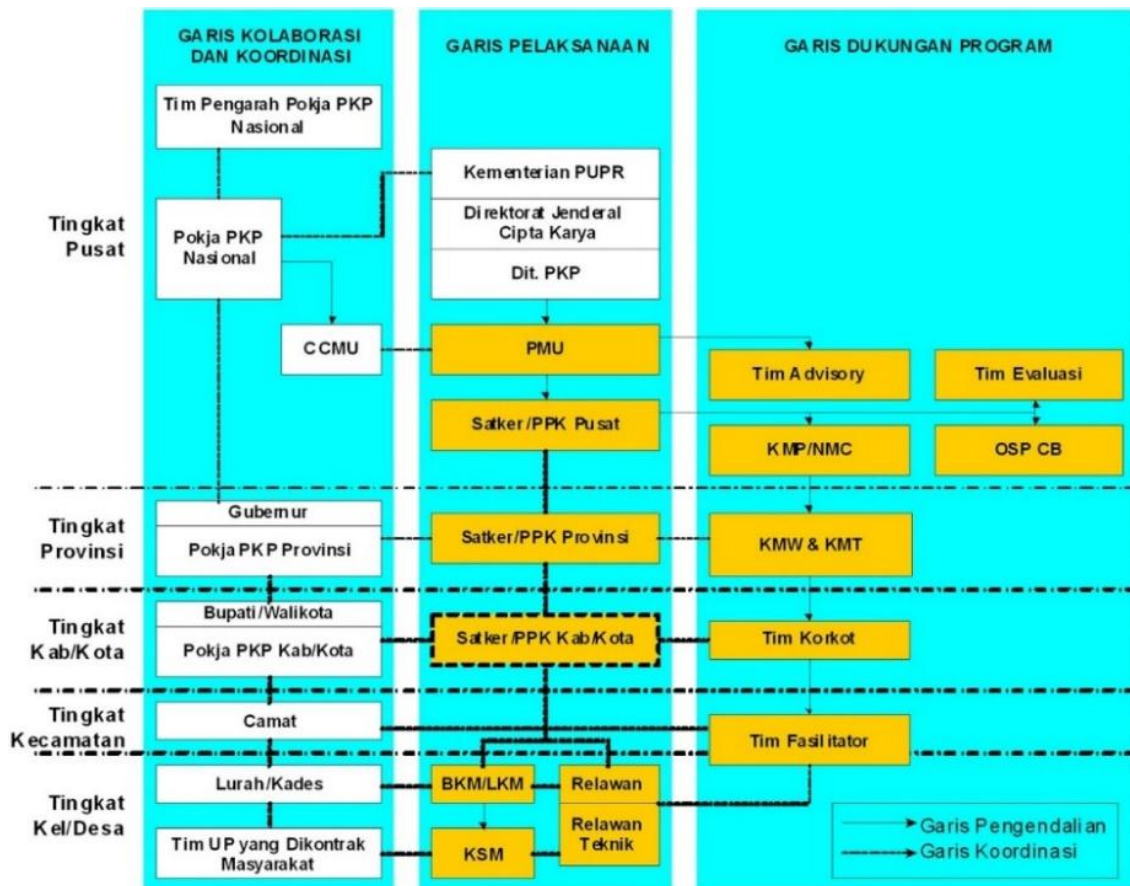
Program KOTAKU adalah suatu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan

permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100. Gerakan 100-0-100 merupakan 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak pakai. Arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas. Program KOTAKU akan mengangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kelurahan/desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten/kota dihapkan dapat melakukan kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan 0 Ha permukiman kumuh hingga tahun 2019. Adapun

kolaborasi yang dilakukan untuk Program KOTAKU adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

**Gambar 1**  
**Kolaborasi Program KOTAKU**



Sebagai satu kesatuan wilayah kabupaten/kota maka pemerintah kelurahan/desa bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 11.

perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan kolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kecamatan yang dilengkapi dengan perencanaan rinci dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Perencanaan di tingkat kelurahan/desa tersebut tentunya harus terkoneksi dengan sistem perencanaan penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan selaras dengan Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan rencana tahapan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.<sup>29</sup>

Permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, tingkat kepadatan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 13

bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragam budaya yang dianut.<sup>30</sup>

## **2. Tujuan Program KOTAKU**

Tujuan Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Mengacu pada tujuan tersebut, tujuan antara penyelenggaraan Program KOTAKU

---

<sup>30</sup> Ike Andini, *Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya*, (Surabaya: FISIP Universitas Airlangga, 2013), hlm. 41.

tingkat kelurahan/desa adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan penataan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kelurahan/desa.<sup>31</sup>

### **3. Lokasi Sasaran Program KOTAKU**

Program KOTAKU dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota, dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota terpilih yang memenuhi kriteria tertentu.

---

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>32</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, (Jakarta: 2016), hlm.9.



2. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan kecamatan perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
3. Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semu lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.
4. Lokasi penataan permukiman mencakup seluruh kelurahan/desa yang menjadi lokasi sasaran Program KOTAKU.
5. Lokasi sasaran penerima bantuan dana investasi (BDI) untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh akan diatur secara terpisah melalui surat penetapan lokasi dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

#### **4. Strategi Program KOTAKU**

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Ibid*, hlm. 6.

1. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
3. Menerapkan perencanaan partisipasi dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi sektor dan multi aktor.
4. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam anggota RPJM daerah dan perencanaan formal lainnya.
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
6. Meningkatkan akses terhadap layanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota.
7. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan.

8. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci
9. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

## **5. Tahapan Penyelenggaraan Program KOTAKU**

Penyelenggaraan program KOTAKU terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kota/Kabupaten dengan masyarakat dan pihak lainnya. Adapun penyelenggaraan Program KOTAKU adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tingkat nasional, Tahap persiapan ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang

kumuh dan mengapa menangani kumuh. Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari:<sup>34</sup>

- a) Advokasi dan sosialisasi Program KOTAKU.
  1. Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat.
  2. Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program.
  3. Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota.
- b) Penentuan Kabupaten atau Kota sasaran
  1. Seleksi Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen penanganan permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan program.
  2. Penandatanganan MOU antara pusat dan pemerintah daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU.
- c) Pengembangan kebijakan dan penguatan kelembagaan.

---

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya ,*Op. Cit*, hlm: 12

1. Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan atau pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung.
2. Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti kelembagaan masyarakat.
3. Pengembangan sistem informasi terpadu
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan nasional.

Pada tingkat kabupaten/kota, tahap persiapan meliputi:

- a. Penyepakatan MOU antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan program KOTAKU. MOU menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten.kota yang bersangkutan, termasuk apakah menggunakan rencana penanganan

permukiman kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum dan tercantum dalam RPJM) merevisi, atau menyusun yang baru.

- b. Lokakarya sosialisai kabupaten atau kota.
- c. Penggalangan komitmen para pemangku kepentingan
- d. Pembentukan atau penguatan pokja penanganan permukiman kumuh.
- e. Komitemen penyusunan dokumen.

Pada tahap ini beberapa kegiatan akan dilakukan, yaitu sosialisasi awal di tingkat kelurahan/desa, rembug kesiapan masyarakat (RKM), serta pembangunan kelembagaan perencanaan partisipatif tingkat desa/kelurahan.<sup>35</sup>

- 1. Sosialisasi awal dan rembug kesiapan masyarakat (RKM)
  - a) Tujuan
    - 1) Terlaksananya sosialisasi awal kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op. Cit.*, hlm. 15.

permukiman kumuh tingkat kelurahan/desa.

- 2) Tergalangnya relawan dan agen sosialisasi untuk membantu masyarakat dalam kegiatan penataan permukiman, terutama penanganan permukiman kumuh, tingkat kelurahan/desa dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman layak huhi dan berkelanjutan.
  - 3) Terbangunnya kepedulian dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penataan pemukiman kelurahan/desa melalui program KOTAKU.
  - 4) Menggalang komitmen untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah kelurahan/desa sampai 2019 untuk mencapai 0 ha permukiman kumuh.
- b) Metode yang digunakan adalah Lokakarya, sosialisasi massal, diskusi, serta metode

inovatif yang disepakati di tingkat kelurahan/desa.

c) Tahapan Proses<sup>36</sup>

1) Sosialisasi awal kota/kabupaten

Sosialisasi awal kota/kabupaten.

Dari pemerintah kota/kabupaten termasuk pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi awal kepada pemerintah kelurahan/desa dan BKM/LKM mengenai program KOTAKU.

2) Perancangan pesan sosialisasi.

Lurah/Kades, camat dan BKM/LKM difasilitasi tim fasilitator merancang pesan, media dan saluran komunikasi yang tepat untuk melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi awal program KOTAKU. Kegiatan ini didahului oleh kegiatan pemetaan sosial oleh unit pengelola sosial (UPS) dan BKM/LKM untuk mengetahui tokoh kunci, potensi agen sosialisasi, pesan,

---

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Ibid*, hlm.15-16.



media dan saluran yang paling sesuai untuk melakukan sosialisasi program KOTAKU.

3) Sosialisasi awal di kelurahan/desa

Lurah/Kepala desa, camat dan BKM/LKM, mengundang masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan sosialisasi awal. Masyarakat yang ikut berpartisipasi terdiri dari seluruh elemen meliputi kelompok rentan, miskin, perempuan, anak dan kelompok mudah terlibat dalam kegiatan ini.

4) Penggalangan relawan dan agen sosialisasi.

5) Rembug kesiapan masyarakat (RKM).

6) Sosialisasi hasil RKM.

2. Pembangunan Kelembagaan Perencanaan Partisipatif penataan Lingkungan Permukiman tingkat Desa/Kelurahan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 17.

- a) Tujuan
- 1) Terlaksananya review kelembagaan di tingkat kelurahan/desa yang bertanggungjawab untuk merencanakan penataan permukiman secara partisipatif.
  - 2) Berfungsinya lembaga perencanaan partisipatif permukiman yang ada di kelurahan/desa atau membentuk tim inti perencanaan partisipatif (TIPP) baru lagi kelurahan/desa yang belum memiliki lembaga tersebut.
  - 3) Terlaksananya penguatan kapasitas lembaga perencana, lurah/kades dan BKM/LKM untuk memberikan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif penataan lingkungan permukiman.
  - 4) Terbangunnya komitmen dan rencana kerja lembaga perencanaan/TIPP untuk melaksanakan program KOTAKU dengan sepenuh hati, mencurahkan

kapasitas dan sumber daya dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif.

b) Metode

Metode yang digunakan dalam tahapan pembangunan kelembagaan perencanaan partisipatif penataan lingkungan permukiman tingkat desa/kelurahan diantaranya metode rangkaian diskusi, lokakarya, dan pelatihan/coaching, dan kegiatan inovatif lain.

c) Proses

1) Sosialisasi pembangunan lembaga.

Tujuan sosialisasi yaitu:

- a. Agar seluruh pihak memahami pentingnya lembaga perencanaan permukiman tingkat kelurahan/desa.
- b. Membangkitkan kesadaran warga peduli dan memiliki keterampilan di bidang permukiman untuk bergabung dan terlibat aktif dalam perencanaan permukiman.

- 2) Review kelembagaan.
- 3) Penggalangan relawan sebagai anggota TTIP.
- 4) Peningkatan kapasitas TIPP.
- 5) Penyusunan rencana program kerja Program KOTAKU.

b. Tahap perencanaan

Tahap ini adalah tahapan kedua setelah tahap persiapan dari Program KOTAKU di tingkat Kelurahan/Desa. Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagi sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu, tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencana penanganan dan pencegahan kumuh kabupaten atau kota.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 19.

## 1. Kegiatan pemetaan swadaya<sup>39</sup>

### a. Tujuan

- a) Memahami isi data base (*base line*) 100-0-100
- b) Melakukan identifikasi kelengkapan dan akurasi data
- c) Melakukan sinkronisasi data antar kelurahan/desa yang berbatasan
- d) Membangun kesepakatan untuk memanfaatkan data base (*base line*) sebagai data dasar penyusunan perencanaan dengan menerbitkan memorandum atau SK (Surat Keputusan) kumuh ditingkat kabupaten/kota.

### b. Proses:

- a) Melakukan *coaching/on the job training* mengenai kegiatan konsolidasi atau review data base (*base line* 100-0-100) pada lurah/kepala desa, camat, TIPP, BKM/LKM.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 23.

- b) Mempersiapkan kelengkapan data base (*base line*) 100-0-100.
- c) Melakukan rembuk untuk memahami kelengkapan dan akurasi data base (*base line*) 100-0-100 di tingkat kelurahan/desa.
- d) Melakukan rembuk di tingkat kecamatan untuk mensinkronisasi data base (*base line*) 100-0-100, antar kelurahan/desa yang berbatasan. Kegiatan ini dilakukan di wilayah kelurahan atau desa.
- e) Melakukan forum konsultasi di tingkat kota untuk menyepakati hasil review data base (*base line*) 100-0-100 kelurahan/desa.
- f) Merumuskan kesepakatan bersama melalui memorandum atau penerbitan SK pemerintahan kabupaten/kota untuk menyepakatnya sebagai data dasar penyusunan perencanaan,

pengecegan dan peningkatkan kualitas permukiman di wilayahnya.

2. Pelaksanaan pemetaan swadaya<sup>40</sup>

a. Tujuan

- a) Melakukan identifikasi persoalan, potensi dan kendala (sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain) untuk melengkapi hasil data base (*base line*) 100-0-100.
- b) Melakukan kajian pengecegan dan peningkatkan kualitas permukiman berdasarkan data persoalan, potensi dan kendala serta berbagai perencanaan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kawasan permukiman
- c) Melakukan kajian kebutuhan pengembangan (sosial, ekonomi dan lingkungan) kawasa permukiman sesuai standar pelayanan minimum dan sesuai standar kawasan permukiman

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 24.

d) Memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk melakukan proses pemetaan kendala dan potensi yang ada di wilayah kelurahan/desa secara partisipatif.

b. Proses

a) Melakukan penguatan tim pemetaan swadaya yang sudah terbentuk

b) Melakukan *coaching* mengenai pemetaan swadaya kepada lurah/kepala desa, TIPP, BKL/LKM,

c) menyiapkan peta dasar, database permukiman, alat ukur dan peralatan survei lainnya. Isi peta dasar skala 1 banding 5000 minimal memuat :

1. Jaringan

1) Jaringan jalan dan batas batasnya

2) Jaringan pola aliran (seperti selokan , sungai dll)

2. Hamparan

1) Batas-batas administrasi desa atau kelurahan



- 2) Batas-batas lahan
- 3) Batas-batas deliniasi kawasan permukiman kumuh dan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh.
- 4) Batas-batas kawasan sesuai fungsinya seperti kawasan industri, kebun, sawah, bukit, danau, sungai, jurang dan lain-lain.
- 5) Batas-batas dataran rendah atau tanah yang terendam air.
- 6) Batas-batas kawasan khusus seperti kuburan.

### 3. Bangunan

- 1) Bangunan rumah yang masih berdiri.
  - 2) Bangunan khusus ( masjid, gereja, kantor kelurahan dsb)
  - 3) Sisa-sisa bangunan yang lain.
- d) Menyiapkan dokumen peraturan daerah, kebijakan dan perencanaan-perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang akan

mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman desa/kelurahan.

- e) Melakukan kajian data base (*base line*).
1. Melakukan kajian persoalan, potensi dan kendala pengembangan sosial, ekonomi dan lingkungan.
  2. Melakukan kajian terhadap persoalan dan kebutuhan penanganan persoalan 8 indikator kumuh.
  3. Melakukan kajian persoalan sumber kehidupan dan penghidupan (potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi keuangan, potensi infrastruktur dan potensi sosial) serta melakukan kajian penyelesaian persoalan dan identifikasi kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rumah tangga dan kegiatan usaha lokal produktif serta potensial (merujuk pada pos pengembangan kehidupan berbasis masyarakat)

4. Melakukan kajian persoalan sosial dan kearifan masyarakat di kawasan permukiman dan menyepakati penyelesaian persoalan warga.
5. Melakukan kajian aspek kepemilikan lahan dan bangunan
6. Melakukan kajian perijinan bangunan atau ijin lokasi di kawasan permukiman
7. Melakukan review atau tinjauan kebijakan dan perencanaan-perencanaan pembangunan kota. Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk memahami dan sinkronisasi serta konsolidasi kebijakan perencanaan pembangunan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kawasan permukiman kumuh dan atau yang berpotensi menjadi kumuh. Hasil review menjadi dasar untuk merumuskan dokumen rencana pembangunan lingkungan

pengecegan kualitas permukiman kumuh.

- e) Melakukan kajian analisis resiko bencana kelurahan/desa yang memiliki kawasan yang rawan bencana dan resiko yang ditimbulkan, selain itu juga analisis yang berkaitan dengan mintigasi bencana.
- f) Menyajikan hasil kajian kedalam bentuk matriks dan peta-peta tematik analisis.
- g) Sosialisasi hasil pemetaan swadaya melalui berbagai media .

Dalam kegiatan pemetaan swadaya yang disajikan dalam keadaan matriks data dan peta-peta tematik, sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Data kondisi perumahan dan persoalannya
2. Data sosial masyarakat terkait budayanya
3. Data hasil kajian persoalan sumber kehidupan dan penghidupan (potensi sumber daya manusia, potensi sumber

---

<sup>41</sup> Data Faskel Krobokan dan BKM Arta Kawula Krobokan.

daya alam, potensi keuangan, potensi infrastruktur dan potensi sosial.

4. Data peruntukan lahan
5. Data dan peta status kepemilikan lahan.
6. Peta persil/ tapak perpetakan lahan
7. Peta kecenderungan perkembangan pembangunan fisik wilayah keluaran.
8. Peta perletakan rumah (Khususnya masyarakat miskin).
9. Peta sistem sarana dan prasarana dasar lingkungan atau kawasan dan kondisi koneksi sistem sarana dan prasarana dasar antar kelurahan dan kawasan perkotaan.

c. Tahap pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahapan ketiga dan tahapan paling penting dari proses pelaksanaan Program KOTAKU ditingkat Kelurahan/Desa. Tahap pelaksanaan baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana

penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.<sup>42</sup>

Di bawah ini adalah tahapan persiapan untuk kegiatan infrastruktur tersier yaitu infrastruktur dengan skala pelayanan tingkat kelurahan/desa. Tujuan dari kegiatan persiapan pelaksanaan adalah terlaksanannya persiapan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa. Metode yang digunakan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan/desa yaitu dengan menggunakan metode pelatihan, pertemuan, FGD dan kegiatan inovatif lainnya. Pelaksanaan konstruksi tingkat kelurahan/desa

Di bawah ini adalah tahapan pelaksanaan konstruksi tingkat kelurahan dan desa. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk terlaksananya kegiatan konstruksi agar terbangun infrastruktur skala kelurahan atau desa yang berkualitas, berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik. Metode yang digunakan adalah pelaksanaan konstruksi,

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

monitoring dan pencatatan pelaporan. Adapun proses yang dilalui adalah sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. Melakukan *coaching/ on the job training* mengenai pelaksanaan kegiatan konstruksi agar terbangun infrastruktur skala kelurahan yang berkualitas, yang berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik.
- b. Melakukan sosialisasi kegiatan pelaksanaan infrastruktur skala kelurahan melalui berbagai media.
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja konstruksi.
- d. Pelaksanaan konstruksi.
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan konstruksi, baik pembukuan keuangan maupun pelaporan infrastruktur.
- f. Serah terima aset infrastruktur, jika pendanaan bersumber dari APBD dan atau APBN.
- g. Melakukan sosialisasi hasil persiapan pelaksanaan kegiatan infestasi infrastruktur skala tersier/lingkungan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

d. Tahap keberlanjutan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari Program KOTAKU. Tahap keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan di mana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi.<sup>44</sup>

Dari sisi pelaku, seluruh tahapan penyelenggaraan program KOTAKU utamanya dilakukan oleh lima tingkatan pelaku, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat dan komunitas.

Kegiatan menerus dan berkala ini akan dilaksanakan dari mulai tahap persiapan sampai keberlanjutan sesuai kebutuhan, kegiatan-kegiatan tersebut adalah:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 56.



## 1. Monitoring dan evaluasi setiap kegiatan

Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah kelurahan/desa, BKM/LKM, TIPP, dan masyarakat baik di dalam maupun luar kelurahan/desa untuk menjamin setiap kegiatan terlaksana dengan kualitas baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program sudah sesuai dengan rencana dan mencapai target pencapaian visi permukiman dan pengurangan luas kumuh. Review setiap tahapan kegiatan dapat dilakukan secara regular atau sesuai kebutuhan. Audit keuangan dan audit kegiatan harus dilakukan sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi. Laporan tahunan untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana dan hasil kegiatan penataan permukiman dilakukan secara rutin sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas.

## 2. Pengembangan kapasitas

Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan

sosialisasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala pada setiap tahapan kegiatan, redilar dan atau menerus tanpa putus. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kelurahan/desa, BKM/LKM, TIPP, relawan, dan masyarakat dalam rangka menjalankan setiap tahapan kegiatan agar kegiatan dapat menerus demi tercapainya visi permukiman dan tercapainya 0 ha kumuh pada 2019.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM**  
**KOTAKU**

**A. Gambaran Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Semarang**

**1. Profil Kelurahan Krobokan**

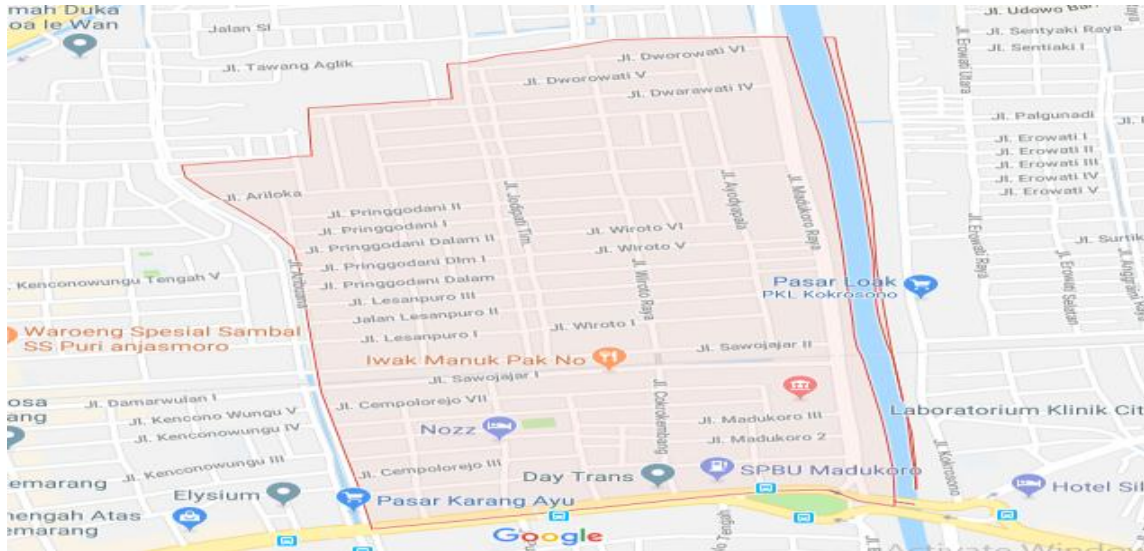
Kelurahan Krobokan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang terbentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Semarang. Kondisi masyarakat Kelurahan Kerobokan sangat heterogen, yang berarti hampir seluruh penduduk yang berdomisili disana sangatlah beragam. Oleh karena itu, diperlukan pola-pola tertentu dalam rangka pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan Krobokan mempunyai wilayah seluas 82,50 Ha dengan ketinggian 5 m di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 91 RT dan 13 RW.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ali Ahwan selaku Pegawai Kelurahan Krobokan pada tanggal 28 Maret 2018.

## Gambar 2

### Peta Kelurahan Krobokan



Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berbatasan dengan:<sup>2</sup>

1. Sebelah Utara : Kelurahan Tawang Mas
2. Sebelah Selatan : Jl. Jendral Sudirman
3. Sebelah Timur : Sungai Banjir Kanal Barat
4. Sebelah Barat : Kelurahan Karangayu

Wilayah Kelurahan Krobokan memiliki suhu yang hampir sama dengan suhu wilayah-wilayah di Kota Semarang yang menurut Badan Meterologi,

---

<sup>2</sup> Data Monografi Kelurahan Krobokan tahun 2017.

Klimatologi dan Geofisika rata-rata berkisar antara 35<sup>0</sup> C – 36<sup>0</sup> C. Jumlah penduduk Kelurahan Krobokan sebanyak 15563 jiwa yang terbagi menjadi 5156 KK, dengan demikian kepadatan penduduk wilayah ini berkisar 18.864,24 jiwa/km.<sup>3</sup>

Struktur organisasi Kelurahan Krobokan adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Lurah :  
Samiyono, SH
- b. Sekertaris :  
Retno Setyaningsih
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan :  
Sri Lestari
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial :  
Dwi Pujiastuti, SE
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :  
Ali Akhwan

Kelurahan Krobokan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 15.563 jiwa. Kelompok umur di Keluraha Korobokan terdiri dari usia 0-75

---

<sup>3</sup> Data Monografi Kelurahan Krobokan tahun 2017.

<sup>4</sup> Arsip Kelurahan Krobokan tahun 2017.

dikelompokkan menjadi kelompok umur produktif dan non produktif. Kelompok umur produktif adalah penduduk berusia 15-55 tahun, sedangkan kelompok usia non produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 55 tahun. Kelurahan Krobokan memiliki penduduk produktif jauh lebih banyak dari pada usia non produktif.<sup>5</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

**Jumlah penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Usia</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	0-4	496	563	1.059
2.	5-9	491	561	1.052
3.	10-14	483	563	1.046
4.	15-19	193	613	806
5.	20-24	599	697	1.296
6.	25-29	458	654	1.112

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Imran Pada tanggal 28 Maret 2018.

7.	30-34	516	416	932
8.	35-39	692	635	1.327
9.	40-44	601	666	1.267
10.	45-49	792	681	1.473
11.	50-54	507	680	1.187
12.	55-59	432	598	1.030
13.	60-64	378	501	879
14.	65-69	313	381	694
15.	70-74	201	96	297
16.	75+	25	81	106
<b>Jumlah</b>		<b>7.753</b>	<b>7.810</b>	<b>15.563</b>

*Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan tahun 2017*

Dilihat jumlah penduduk menurut usia di atas menunjukkan bahwa usia 0 – 4 tahun sebanyak 1.059 orang, usia 5 – 9 tahun sebanyak 1.052 orang, usia 10 – 14 tahun sebanyak 1.046 orang, usia 15 – 19 tahun sebanyak 806 orang, usia 20 -24 tahun sebanyak 1.296 orang, usia 25 – 29 tahun sebanyak 1.112 orang, usia

30 – 34 tahun sebanyak 932 orang, usia 35 – 39 tahun sebanyak 1.327 orang, usia 40 – 44 tahun sebanyak 1.267, usia 45 - 49 tahun sebanyak 1.473 orang, usia 50 – 54 tahun sebanyak 1.187 orang, 55 – 59 tahun sebanyak 1.030 orang, usia 60 - 64 tahun sebanyak 879 orang, usia 65 – 69 tahun sebanyak 694 orang, usia 70 – 74 tahun sebanyak 297 orang, usia 75 tahun keatas sebanyak 106.

**Tabel 2**

**Jumlah penduduk menurut jenis pendidikan**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum Sekolah	1.404
2	Tidak tamat sekolah dasar	998
3	Tamat SD Sederajat	1.315
4	Tamat SLTP sederajat	2.990
5	Tamat SLTA sederajat	3.836
6	Tamat Akademi Sederajat	1.689
7	Tamat Perguruan Tinggi Sederajat	1.630



<b>Jumlah</b>	<b>13.862</b>
---------------	---------------

*Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan tahun 2017*

Dari tabel di atas bahwa penduduk Kelurahan Krobokan dilihat dari segi pendidikan, belum sekolah sebanyak 1404 orang, tidak tamat sekolah dasar sebanyak 998 orang, tamat SD sederajat sebanyak 1315 orang, tamat SLTP sederajat sebanyak 2290 orang, tamat SLTA sederajat sebanyak 3836 orang, tamat Akademik sederajat sebanyak 3836, tamat perguruan tinggi sederajat sebanyak 1630 orang. Dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Krobokan adalah tamat SLTA.

**Tabel 3**

**Jumlah Lembaga Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Jenis lembaga Pendidikan</b>	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Jumlah</b>
1	PAUD	1	2	3
2	TK	2	8	20

3	SD	1	2	3
4	SLTP	1	2	3
5	SLTA	0	0	0
6	Raudhlatul Athfal	0	1	1
7	Pondok Pesantren	0	0	0
8	Sekolah Minggu	0	0	0
<b>Jumlah</b>				<b>30</b>

*Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan  
tahun 2017*

Dari tabel di atas, jumlah lembaga pendidikan di Kelurahan Krobokan yaitu PAUD sebanyak 3, TK sebanyak 20, SD sebanyak 3, SLTP sebanyak 3 dan Raudhlatul Athfal hanya 1.

**Tabel 4**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Bangunan	124
2	Pegawai Negeri Sipil	276

3	Nelayan	14
4	TNI	24
5	Buruh Industri	1.174
6	Pedagang	189
7	Industri Kecil	246
8	Pengusaha Besar	24
9	Pengangkutan	31
10	Peternak	1
<b>Jumlah</b>		<b>2.103</b>

*Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan  
tahun 2017*

Dari tabel di atas, jumlah penduduk menurut mata pencaharian Kelurahan Krobokan dapat dilihat bahwa buruh bangunan sebanyak 1124 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 276 orang, Nelayan sebanyak 14 orang, TNI sebanyak 24 orang, Buruh industri sebanyak 1.174 orang, Pedagang sebanyak 189 orang, Industri kecil sebanyak 246 orang,

Pengusaha Besar sebanyak 24 orang, Pengangkutan sebanyak 31 orang, Peternak sebanyak 1 orang.

**Tabel 5**

**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	14.372
2	Protestan	563
3	Katholik	485
4	Hindu	24
5	Budha	85
6	Konghucu	0
<b>Jumlah</b>		<b>15.529</b>

*Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan tahun 2017*

Jumlah penduduk Kelurahan Krobokan dilihat dari segi agama mayoritas adalah agama islam yaitu sebanyak 14.372 orang, agama Kristen Protestan sebanyak 563 orang, agama Katholik sebanyak 485, agama Hindu sebanyak 24, sedangkan

agama Budha sebanyak 85 orang dan tidak ada yang beragama konghucu.

## **B. Gambaran Umum Program KOTAKU**

Data permukiman kumuh BPS diperoleh dengan cara mengolah data Potensi Desa (Posdes) tahun 2000 dan Survei Sosial dan Ekonomi (Susenas) tahun 2001. Rekapitulasi permukiman kumuh menurut BPS terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Permukiman Kumuh Menurut BPS**

<b>No</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Jumlah Lokasi</b>	<b>Jumlah RT</b>	<b>Luas Kawasan Kumuh (Ha)</b>
1	Aceh Darusalam	273	8.385	3.787.20
2	Sumatera Utara	1.021	41.625	2.467.20
3	Sumatera Barat	40	1.302	68.30
4	Riau	430	18.490	5.613.40

5	Jambi	57	2.186	56.70
6	Sumatera Selatan	361	18.726	1.137.60
7	Bengkulu	47	2.099	56.20
8	Lampung	339	17.876	710.80
9	DKI Jakarta	887	113.160	1.753.90
10	Jawa Barat	2.171	96.457	4.762.30
11	Jawa Tengah	372	19.760	649.70
12	DI Yogyakarta	7	2.50	364
13	Jawa Timur	433	37.222	533.30
14	Bali	33	1.057	12.70
15	NTB	1.058	66.419	2.383.70
16	NTT	39	2.080	67.00
17	Kalimantan Barat	507	19.179	3.903.80
18	Kalimantan Tengah	82	6.646	129.10
19	Kalimantan Selatan	283	12.717	331.30

20	Kalimantan Timur	235	28.023	1.845.10
21	Sulawesi Utara	147	5.906	4.769.60
22	Sulawesi Tengah	119	5.906	209.80
23	Sulawesi Selatan	685	35.702	2.414.10
24	Sulawesi Tenggara	308	12.554	9.384.90
25	Maluku	42	1.620	38.90
26	Papua	89	5.124	304.00
<b>Jumlah</b>		<b>10.065</b>	<b>582.028</b>	<b>47.393.10</b>

### 1. Wilayah Kumuh Kelurahan Krobokan

Berdasarkan Surat Keputusan Kumuh yang di ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Januari tahun 2017 bahwa Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dikategorikan sebagai wilayah permukiman kumuh karena kondisi rumah-rumah di Kelurahan ini belum sepenuhnya terlayani dengan fasilitas pelayanan seperti jalan

berlubang, tidak terpeliharanya drainase, sistem pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga banyak sampah yang berserakan di saluran drainase.<sup>6</sup> Luas wilayah kumuh di Kelurahan Krobokan adalah 16,16 Ha yang terbagi menjadi 24 RT dan 6 RW. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>7</sup>

**Tabel 7**

**Wilayah Kumuh Kelurahan Krobokan**

<b>No</b>	<b>RT</b>	<b>RW</b>
1	06	06
2	01	07
3	01 – 06	08
4	01 – 06	09
5	03 – 09	12
6	03, 06, 07, 08	13
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>6</b>

---

<sup>6</sup> Data Fasilitator KOTAKU Tahun 2017.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Titik Pada tanggal 28 Maret 2018 .



Menurut Ibu Titik Kelurahan Krobokan dibagi menjadi dua indikator kumuh yaitu pertama, kualitas permukaan jalan yang buruk seperti jalan berlubang yang menyebabkan kurang nyaman pengguna jalan ketika melewati jalan tersebut sehingga dibutuhkan perbaikan permukaan jalan dengan pavingisasi. Pada indikator ini berada di wilayah RT 06 RW 06, RT 03 – 09 RW 12. Kedua, kurang terpeliharanya saluran drainase dan kualitas konstruksi saluran drainase sehingga saluran drainase tidak mampu mengalirkan air limbah rumah tangga dan menjadi penyebab banjir ketika hujan turun. Pada indikator ini berada di wilayah RT 06 RW 06, RT 01 RW 07, RT 01-06 RW 08, RT 01-06 RW 09, RT 03, RT 06, RT 07, RT 08 RW 13.<sup>8</sup>

Jumlah dana bantuan Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan tahun 2017 senilai Rp. 500.000.000 juta rupiah. Rincian kegiatan penanganan Kumuh sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Titik Pada tanggal 10 Juli 2018.

<sup>9</sup> Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KOTAKU tahun 2017.

- a. Perbaiki jalan Paving dan saluran di RW 08 sebanyak Rp. 213.500.000 juta rupiah.
- b. Perbaiki saluran drainase RW 7, RW 6 dan RW 13 sebanyak Rp. 205.720.000 juta rupiah.
- c. Perbaiki saluran drainase RW 9 dan RW 12 sebanyak Rp. 75.780.000 juta rupiah.
- d. Biaya Operasional sebanyak Rp. 5.000.000 juta rupiah.

Tujuan Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan adalah meningkatkan akses infrastruktur terutama dalam kualitas perbaikan jalan dan pemeliharaan saluran drainase agar terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Krobokan.

Bentuk partisipasi masyarakat Krobokan dalam Program KOTAKU adalah melibatkan diri dalam diskusi, rembuk atau musyawarah yang diadakan oleh BKM maupun pemerintah desa, mengambil bagian dari proses pengambilan keputusan, menyumbangkan ide maupun gagasan untuk menyukseskan program KOTAKU serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan

dengan Program KOTAKU untuk mengembangkan potensi masyarakat seperti: pelatihan Tim Inti Perencana Partisipasi, pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat, pelatihan relawan dan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat.<sup>10</sup>

### **Gambar 3**

#### **Pelatihan Kapasitas Masyarakat**



*Sumber: Dokumen BKM Arta*

#### *Kawula*

Karakteristik masyarakat Krobokan berbeda-beda. Hal ini lah yang mempengaruhi faktor penghambat Program KOTAKU, karena tidak semua masyarakat Krobokan ikut

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Titik Pada tanggal 10 Juli 2018.

berpartisipasi. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan adalah sifat malas, apatis, serta adanya masyarakat yang kurang responsif. Menurut penuturan Ibu Titik bahwa adanya Ketua RT dan RW tertentu yang kurang merespon informasi yang telah BKM dan fasilitator berikan sehingga menyebabkan masyarakat yang tidak mengetahui Program KOTAKU. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pemetaan swadaya yang tidak merata atau kurang valid.<sup>11</sup>

## **2. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan**

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Krobokan di mulai pada bulan Januari tahun 2017 setelah keluarnya Surat Keputusan Kumuh dari pemerintah pusat. Adapun rincian pelaksanaan Program KOTAKU adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Titik Pada tanggal 10 Juli 2018.

<sup>12</sup> Data Fasilitator KOTAKU Tahun 2017.

**Tabel 8**  
**Pelaksanaan Program KOTAKU**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Mulai</b>	<b>Selesai</b>
1	Penetapan Lokasi Program KOTAKU Tahun 2017	03 Januari 2017	10 Febuari 2017
2	Penyiapan Lokasi Kolaborasi Pencegahan Kumuh	03 Januari 2017	30 Maret 2017
3	Sosialisasi Workshop Nasional	20 Febuari 2017	28 Febuari 2017
4	Pelatihan Koordinator Kota (Korkot)	05 Mei 2017	05 Mei 2017
5	Pelatihan Fasilitator	02 Mei 2017	16 Juni 2017
6	Pelatihan Tukang (Building Control)	01 Mei 2017	25 Mei 2017
7	Pelatihan Lurah dan Camat	01 Juni 2017	30 November 2017
8	Pelatihan BKM	01 Juni 2017	30

			November 2017
9	Pelatihan Relawan	01 Juni 2017	30 November 2017
10	Pelatihan Perencanaan Partisipatif	01 Juni 2017	30 November 2017
11	Pelatihan KSM	01 Juni 2017	30 November 2017
12	Sosialisasi Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan	5 Januari 2017	31 Maret 2017
13	Penggalangan Relawan	5 Januari 2017	31 Maret 2017
14	Musyawahah Persiapan Pelaksanaan Kontruksi (MP2K)	15 April 2017	30 April 2017
15	Pelaksanaan pembangunan fisik	30 Agustus 2017	30 Oktober 2017

16	Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh LKM	15 Oktober 2017	30 November 2017
17	Monitoring dan supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik	15 September 2017	30 November 2017
18	Fasilitasi pengelolaan data Base Kumuh	01 Febuari 2017	30 Desember 2017
19	Pelaksanaan RWT BKM	01 November 2017	30 Desember 2017
20	Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program	01 Febuari 2017	30 Desember 2017

***Sumber: Jadwal Pelaksanaan KOTAKU tahun 2017.***

### **3. Tahapan Penyelenggaraan Program KOTAKU**

Penyelenggaraan program KOTAKU di Kelurahan Krobokan terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi

antara Pemerintah Kota dengan masyarakat yang telah didampingi fasilitator kelurahan. Adapun penyelenggaraan Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan program KOTAKU. Pada tahap ini beberapa kegiatan akan dilakukan, yaitu sosialisasi awal di Kelurahan Krobokan, perancangan pesan sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) Krobokan yang akan untuk membantu menyukseskan kegiatan penataan pemukiman di Krobokan.

sosialisasi awal di Kelurahan Krobokan, sosialisai awal tentang KOTAKU di laksanakan pada 03 Febuari 2017 yang bertempat di kantor BKM Arta Kawula Krobokan. Sosialisasi ini membahas tentang pengenalan program KOTAKU yaitu meliputi apa itu KOTAKU, Visi dan Misi KOTAKU, Tujuan dan sasaran program KOTAKU, teknis pelaksanaan Program KOTAKU dan lain sebagainya. Peserta yang



mengikuti adalah Camat, Lurah, BKM, Karang Taruna, Tokoh Agama, Kelompok Swadaya Masyarakat, Tim Inti Perencana Partisipatif, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Krobokan.<sup>13</sup>

Perancangan pesan sosialisasi ke warga yang dilakukan oleh Lurah, dan BKM, KSM, TIPP yang didampingi oleh fasilitator. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan Program KOTAKU. Pada tahap ini kegiatannya adalah perancangan sosialisasi ke warga melalui rebug warga di tingkat RT/RW serta pembuatan pamflet tentang pengenalan Program KOTAKU pada masyarakat Krobokan.<sup>14</sup>

Hasil dari kegiatan tersebut adalah mengetahui jumlah wilayah kumuh di Kelurahan Krobokan yaitu seluas 16,16 Ha yang terbagi dalam Rt 01 RW 06, RT 01 RW 07, RT 01- 06 RW8, RT 01-06 RW 9, RT 03-09 RW 12 dan RT 03, 06, 07, 08 RW 13. Pemetaan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berkoordinasi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

dengan ketua RT dan ketua RW setempat. Dari hasil pemetaan tersebut maka akan di tindak lanjuti pada tahap perencanaan.<sup>15</sup>

Setelah Perancangan pesan sosialisasi selesai, maka dilanjutkan sosialisasi pada warga. Pada tahap ketiga ini dilaksanakan di kantor BKM Arta Kawula Krobokan didampingi fasilitator dan mengundang peserta dari pejabat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, relawan, KSM, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan warga. Pada tahap ini membahas tentang pengenalan Program KOTAKU yang meliputi Visi dan Misi KOTAKU, Tujuan dan sasaran program KOTAKU, teknis pelaksanaan Program KOTAKU dan lain sebagainya. Pada tahap ini juga menjelaskan target dari program KOTAKU oleh BKM Arta Kawula.<sup>16</sup>

Penggalangan relawan dilaksanakan di kantor BKM Arta Kawula dengan peserta

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Ahwan pada tanggal 27 Maret 2018

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.

masyarakat Krobokan yang diwakili oleh RT, RW, KSM, TIPP, LPMK, Tokoh Agama dan Karang Taruna, dengan narasumber BKM Arta Kawula dan di damping Fasilitator.<sup>17</sup> Pada tahap ini membahas tentang penggalangan relawan untuk membantu dari segi tenaga maupun pikiran dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program KOTAKU. Penggalangan relawan tidak ada kriteria khusus tanpa melihat umur, pendidikan, maupun jenis kelamin. Namun relawan disini di khususkan untuk masyarakat krobokan. Relawan tersebut diantaranya adalah: Heri Herantoro, Heri Laksono, Hermanto Ropingi, Tohar, Rustanto, Mukayah dan Yudi Hartoto.<sup>18</sup>

Pada tahap Rembug kesiapan masyarakat (RKM) dilaksanakan di kantor BKM Arta Kawula dengan peserta masyarakat Krobokan yang diwakili oleh tokoh masyarakat RT, RW, tokoh agama dan karang taruna, dengan narasumber BKM Arta Kawula dan di damping

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Mukayah pada tanggal 23 April 2018.

Fasilitator. Pada tahap ini BKM Arta Kawula mengajak masyarakat Krobokan untuk menumbuhkan kepedulian warga serta tokoh masyarakat juga berpartisipasi dalam menyukseskan penataan pemukiman.<sup>19</sup> BKM ARTA KAWULA menyusun hasil RKM tersebut dalam bentuk pamflet, pamflet tersebut berisi mengenai pengenalan program KOTAKU. Pamflet tersebut disebar di titik wilayah yang nantinya akan diselenggarakan kegiatan program KOTAKU.<sup>20</sup>

**Gambar 4**  
**Pamflet Program KOTAKU**



---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

Tahap selanjutnya adalah review kelembagaan dilaksanakan di Kantor BKM Arta Kawula Krobokan. Peserta dalam tahapan ini adalah Tim Inti perencanaan Partisipatif (TIPP), tim pelaksanaan dalam tahapan ini adalah Lurah Krobokan, BKM ANUGERAH dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Dengan mengundang narasumber Pokja PKP, Pemda, Camat dan di dampingi tim fasilitator.<sup>21</sup>

Kegiatan pada tahap review kelembagaan ini adalah sosialisasi mengenai penguatan kelembagaan agar membangun tim yang solid dan mengembangkan kapasitas, seperti yang telah dijelaskan pada tahap awal penguatan disini adalah memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi lembaga. Kemudian membentuk tim inti perencanaana partisipatif (TIPP), pelatihan peningkatan kapasitas TIPP, seperti pelatihan pembuatan proposal pengajuan dan sampai pembuatan laporan pertanggung jawaban.<sup>22</sup> Kemudian membentuk tim inti TIPP,

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.

pembentukan tim TIPP ini tidak semua bisa menjadi tim TIPP karena tim TIPP harus mempunyai kemampuan untuk memahami suatu permasalahan yang ada dilingkungan. Anggota TIPP terdiri dari anggota BKM, Relawan yang terpilih, PEMDES dan Tokoh masyarakat.<sup>23</sup>

b. Tahap perencanaan

Tahap ini adalah tahapan kedua setelah tahap persiapan dari Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan. Kegiatan pada tahap ini adalah pemetaan swadaya. Pada pemetaan swadaya Lurah, BKM, KSM dan TIPP yang didampingi oleh tim fasilitator melakukan kajian dengan metode rembuk dan survei. Menurut bu Sri selaku fasilitator menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Setelah melakukan rembuk dengan RT/RW, Tokoh masyarakat, maka pemetaan wilayah yang di lakukan oleh tokoh masyarakat seperti RT/RW setempat bertujuan agar tergalangnya partisipasi aktif dari masyarakat, selain itu juga dikarenakan yang lebih paham

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Mukayyah pada tanggal 23 April 2018.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

dan mengetahui kondisi lingkungan adalah ketua RT/RW dari masing-masing wilayah”.<sup>25</sup>

c. Tahap pelaksanaan

Pelaksana dalam kegiatan tahapan pelaksanaan ini adalah dari Tim Inti Perencana Partisiptif, Lurah, BKM Arta Kawula serta Unit Pengelola Lingkungan yang telah didampingi oleh tim fasilitator KOTAKU Krobokan. Peserta kegiatan ini adalah dari panitia pelaksana dan pemateri dari kegiatan ini adalah tim teknis pemerintah daerah dengan menggunakan metode pelatihan, pertemuan, FGD dan kegiatan inovatif lainnya. Kegiatan pelatihannya meliputi pelatihan pelaksanaan pembangunan saluran Drainase Kelurahan Krobokan yang sesuai dengan kriteria standar pembangunan Drainase dari KOTAKU. Kegiatan pertemuannya dimanfaatkan untuk sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan infrastruktur melalui media pemasangan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

MMT/Pamflet di wilayah yang akan diadakan pelaksanaan pembangunan.<sup>26</sup>

Pada tahap Pelaksanaan konstruksi, diharapkan Kelurahan Krobokan memiliki infrastruktur yang berkualitas, berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik, serta diharapkan relawan pemantau kegiatan konstruksi, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) panitia pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Krobokan.

### **C. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Krobokan dalam KOTAKU**

Masyarakat Krobokan berperan aktif dalam proses berlangsungnya Program KOTAKU khususnya adalah pemerintah desa seperti: Camat, Lurah, sekretaris Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Relawan KOTAKU, RT dan RW setempat, Karang taruna, serta tokoh agama. Pemerintah desa tersebut

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Mukayyah tanggal 27 April 2018.



mengikuti pengenalan Program KOTAKU meliputi: apa itu Program KOTAKU, sasaran, Visi Misi, serta pentingnya menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan sesuai dengan standar pemerintah. Pengenalan Program KOTAKU diselenggarakan oleh Kelurahan Krobokan didampingi fasilitator dan Korkot (Koordinator Kota) Program KOTAKU. Masyarakat Krobokan juga berperan dalam pembuatan peta swadaya masyarakat yang bertujuan untuk membuat skala prioritas program tersebut. Skala prioritas tersebut berguna agar tidak salah dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan atau perbaikan saluran drainase dan perbaikan jalan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Retno Setyaningsih selaku sekretaris Kelurahan Krobokan menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

“Semua Masyarakat Krobokan dilibatkan dalam Program KOTAKU dari yang tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan. Bahkan, yang paling semangat itu malah dari

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Retno Setyaningsih pada tanggal 23 April 2018.

orang tuanya mbak, anak mudanya malah kalah semangat dengan yang tua.”

Kemudian, hal lain disampaikan oleh Ibu Mukayah selaku pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Krobokan, beliau menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

“Semua kegiatan pemberdayaan terutama Program KOTAKU itu masyarakat ikut berpartisipasi aktif mbak, apalagi dalam pengambilan keputusan menentukan lokasi pembangunan”.

**a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Menurut pengamatan peneliti, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dimaksud di sini ada pada saat awal tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai dalam tahap keberlanjutan Program

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Mukayyah pada tanggal 23 April 2018.

KOTAKU. Hal ini serupa dengan penjelasan Ibu Retno Setyaningsih, beliau menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

“Program KOTAKU disebut sebagai program pemberdayaan atau pengembangan dikarenakan dalam prosesnya mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan diserahkan 100% dari masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa belajar untuk mengembangkan diri, bertanggung jawab dan mandiri”.

Selain itu juga Ibu Titik selaku manager BKM Arta Kawula juga menyatakan tentang pentingnya pengambilan keputusan dari masyarakat setempat, bahwa:<sup>30</sup>

“Keterlibatan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan karena dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, adanya partisipasi dari

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Retno Setyaningsih pada tanggal 23 April 2018.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.

masyarakat dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri”.

Selain itu, Tim fasilitator Program KOTAKU memaparkan bahwa:<sup>31</sup>

“Proses tahapan Program KOTAKU ini tidak akan berjalan sampai membuahkan hasil ini tanpa adanya masyarakat mbak. Masyarakat Krobokanlah yang justru menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan Program ini dari awal tahap persiapan itu melakukan rembuk sehingga membuahkan hasil yang seperti sekarang bisa dilihat itu. Kemudian dalam tahapan perencanaan, masyarakat juga yang melakukan dan mengidentifikasi kondisi masyarakat untuk pemetaan swadaya sehingga menghasilkan *base line* data yang kemudian mendapat SK Kumuh dari

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

pemerintah pusat. Bahkan dalam proses pelaksanaan juga kita tidak bisa berjalan tanpa campur tangan atau partisipasi masyarakat Krobokan”.

**b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan**

Pelaksanaan yang telah dilaksanakan Oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Program Kota Tanpa Kumuh, hal ini dapat terlihat pada keikutsertaan warga pada pelaksanaan Program KOTAKU. Temuan peneliti di atas, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Titik selaku Manager BKM Arta Kawula. Beliau menyatakan bahwa:<sup>32</sup>

“Kami dari BKM Arta Kawula, Lurah, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa turut terlibat dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Meskipun demikian, tidak semua dari kami ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.

kontruksi namun dibagi ada juga yang ikut hanya dalam persiapan pelaksanaannya saja mbak.”

Menurut Bapak Mulyanto selaku seksi pembangunan di wilayah RW 7 menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

“Kalo dalam proses kontruksi dari RW 7 sih semua masyarakat saya wanti-wanti untuk mengikuti mbak, karena biar pekerjaan pembangunannya bisa cepet terselesaikan.”

Ibu Sri selaku Fasilitator menyampaikan bahwa:<sup>34</sup>

“Saya sangat mengapresiasi semangat masyarakat dalam Program KOTAKU ini. Setelah sosialisasi yang kami adakan dengan pihak BKM, masyarakat langsung mengagendakan untuk turut serta dalam proses pelaksanaan program.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyanto pada tanggal 27 April 2018.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

Apalagi tim relawan dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif, mereka juga sangat aktif dan mengerahkan seluruh anggota kelompoknya untuk berperan pada pelaksanaan program ini.”

### **c. Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi**

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat boleh manghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Selain itu, semakin sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu akan lebih baik. Khusus untuk BKM Arta Kawula diharuskan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan sebagai laporan pertanggung jawaban. Berikut adalah penjelasan Bu Titik:<sup>35</sup>

“Masyarakat boleh saja mengawasi tapi sangat di khususkan untuk BKM karna yang tau persis perkembangannya, kalau masyarakat mau setiap haripun mereka

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.

mengawasi malah jauh lebih baik mbak. Dan RT/RW setempat yang sangat diwajibkan dalam hal pengawasan. Kalau seumpama hasilnya gak bagus kan RT/RW nya juga kena komplain dari warganya mbak. Selama ini RT/RW ssetempat, BKM dan didampingi fasilitator aktif mengawasi, masyarakat sekitar palingan Cuma liat-liat udah gitu aja. Kalau rapat evaluasi ada di musyawarah yang di adakan pihak Kelurahan Krobokan”.

Setelah pelaksanaan Program KOTAKU selesai, partisipasi masyarakat dalam menilai atau evaluasi pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan



rencana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Pak Mulyanto sebagai berikut:<sup>36</sup>

“Kepingin saya lebih diratakan lagi, inikan jalannya terlalu tinggi dan juga tidak rata cuman lihat pinggirnya itu masih bolong-bolong mbak, jadi kepengennya sih rata sampai kedepan dirapikan sampai yang bolong itu tertutup semua.”

Hal lain diungkapkan juga oleh Ibu Sri, sebagai berikut:<sup>37</sup>

“Sebenarnya tiap masyarakat ikut mengevaluasi Program pembangunan ini mbak, kemudian evaluasi itu di tampung oleh RT/RW yang kemudian dirembuk lagi melalui rapat yang diadakan oleh Kelurahan Krobokan yang didampingi fasilitator.”

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyanto pada tanggal 27 April 2018.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

#### **d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat**

Pada tahap ini masyarakat memperoleh hasil dari program KOTAKU. Tahap penerima hasil ini merupakan wujud dalam partisipasi, partisipasi pada tahap ini dengan melibatkan masyarakat pada tahap pemanfaatan Program KOTAKU. Pemanfaatan ini selain dilihat dari hasil-hasil pembangunan juga dilihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Menurut Ibu Samiasih, menjelaskan tentang manfaat dari Program ini yaitu:<sup>38</sup>

“Manfaat yang dirasakan pertama waktu saya naik honda (motor) lewat bisa agak santai dan nyaman. Karena dulunya jalan disini berlobang itu saya was-was mbak, apalagi dulu itu kan saya belum begitu lancar naik hondanya dan sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki. Kedua, dulu waktu selokannya belum di bikin kayak gini, banjir bisa selutut bahkan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Samiasih pada tanggal 27 April 2018.

lebih dan sekarang maksimal tidak sampai 30 cm mbak”.

Hal demikian juga dirasakan oleh Bapak Mulyanto:<sup>39</sup>

“Dulu mbak sebelum dibangun kalo saya lagi duduk nyantai di depan rumah sini pas ada motor atau mobil lewat itu debu nya sangat mengganggu apalagi kalau sedang musim angin, yaahh... tambah parah tu mbak”.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyanto pada tanggal 27 April 2018.

## **BAB IV**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT**

Program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU adalah suatu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100. Gerakan 100-0-100 merupakan 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak pakai.

Program yang sekarang dikenal dengan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) itu baru berganti nama. Dulu namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Nah, salah satu yang sangat melekat dari program tersebut adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Jadi, ada anggaran yang langsung dikucurkan ke masyarakat setelah

penyaringan data. Tujuannya sebagai stimulus usaha-usaha mandiri di masyarakat.<sup>1</sup>

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 26 kabupaten atau kota, pada 11.067 desa dan kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Kumuh yang ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing kabupaten atau kota permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran program KOTAKU adalah seluas 23.656 Ha.<sup>2</sup>

Program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Tahapan pelaksanaan Program Kotaku meliputi tahapan pendataan, dimana Lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan

---

<sup>1</sup> [Http://JawaPos.com/2017/9/13/partisipasi-program-KOTAKU](http://JawaPos.com/2017/9/13/partisipasi-program-KOTAKU) diakses pada 16 Maret 2018.

<sup>2</sup> <http://KOTAKU.go.id> diakses pada 16 Maret 2018.

akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. *Pertama*, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. *Kedua* adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.

Tergambar dalam Surat Edaran E DJCK No. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program KOTAKU tentang prinsip-prinsip penanganan perumahan dan permukiman kumuh adalah salah satunya dengan partisipasi (*participation*) artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Yuliani, Gusty Putri Dhini Rosyida, “Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta”, Dalam *Jurnal Wacana Publik. Vol 1 No 2* Tahun 2017

## **A. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Krobokan.**

Masyarakat Krobokan berperan aktif dalam proses berlangsungnya Program KOTAKU khususnya adalah pemerintah desa seperti: Camat, Lurah, sekretaris Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Relawan KOTAKU, RT dan RW setempat, Karang taruna, serta tokoh agama. Pemerintah desa tersebut mengikuti pengenalan Program KOTAKU meliputi: apa itu Program KOTAKU, sasaran, Visi Misi, serta pentingnya menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan sesuai dengan standar pemerintah. Pengenalan Program KOTAKU diselenggarakan oleh Kelurahan Krobokan didampingi fasilitator dan Korkot (Koordinator Kota) Program KOTAKU. Masyarakat Krobokan juga berperan dalam pembuatan peta swadaya masyarakat yang bertujuan untuk membuat skala prioritas program tersebut. Skala prioritas tersebut berguna agar tidak salah dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan atau perbaikan saluran drainase dan perbaikan jalan.

## **1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Program KOTAKU**

Pengambilan keputusan merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat untuk menghadiri musyawarah atau rapat-rapat yang diadakan oleh Pemerintah Kelurahan atau Desa beserta pemangku program lainnya dalam rangka melakukan suatu pembangunan infrastruktur di Kelurahan Krobokan. Dalam musyawarah tersebut masyarakat diharapkan agar memberikan ide maupun saran sampai ke tahap pengambilan keputusan agar hasil dari program yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dan menjadi langkah awal yang sangat penting dan akan mempengaruhi langkah-langkah serta tahap-tahap berikutnya. Partisipasi dalam bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya untuk menilai sesuatu rancangan program yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Mukayah selaku



pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Masyarakat ikut dilibatkan dalam rapat atau musyawarah, dan di dalam rapat kami berembuk (musyawarah) bersama dengan Ketua RT dan RW, Relawan, BKM, Pak Lurah. Disitulah kita merumuskan dan memutuskan semuanya. Hanya saja kami mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat saja.”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dalam pengambilan keputusan kegiatan sebagian dari masyarakat sudah diundang dalam musyawarah, dengan tujuan agar rencana yang diharapkan dan pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang dianggap bisa bermanfaat dan dimanfaatkan bersama-sama. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada saat tahap persiapan, tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan dalam proses pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini sebagaimana

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Mukayyah pada tanggal 23 April 2018.

telah dijelaskan oleh Ibu Retno Setyaningsih selaku Sekertaris Kelurahan Krobokan, beliau mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Program KOTAKU disebut sebagai program pemberdayaan atau pengembangan dikarenakan dalam prosesnya mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan diserahkan 100% dari masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa belajar untuk mengembangkan diri, bertanggung jawab dan mandiri”.

Selain itu, Tim fasilitator Program KOTAKU memaparkan bahwa:<sup>6</sup>

“Proses tahapan Program KOTAKU ini tidak akan berjalan sampai membuahkan hasil ini tanpa adanya masyarakat mbak. Masyarakat Krobokanlah yang justru menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan Program ini dari awal tahap persiapan itu

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Retno Setyaningsih pada tanggal 23 April 2018.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

melakukan rembuk sehingga membuahkan hasil yang seperti sekarang bisa dilihat itu. Kemudian dalam tahapan perencanaan, masyarakat juga yang melakukan dan mengidentifikasi kondisi masyarakat untuk pemetaan swadaya sehingga menghasilkan *base line* data yang kemudian mendapat SK Kumuh dari pemerintah pusat. Bahkan dalam proses pelaksanaan juga kita tidak bisa berjalan tanpa campur tangan atau partisipasi masyarakat Krobokan”.

Pada tahap pengambilan keputusan tidak semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Tahap ini biasanya diikuti oleh Badan Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Karang taruna, RT dan RW, relawan , pihak dari kelurahan dan tokoh agama. Masyarakat biasanya ikut rembuk membahas program KOTAKU ini pada saat arisan RT dan RW, kemudian gagasan dan hasil dari rembuk masyarakat pada saat arisan RT dan RW tersebut diajukan ke pihak kelurahan dan BKM Arta Kawula. Keputusan yang diambil biasanya

mengenai lokasi pembangunan sesuai dengan pemetaan swadaya yang telah dilakukan sehingga mengetahui dimana lokasi yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan .<sup>7</sup>

Dari wawancara dengan narasumber di atas, Keputusan yang diambil biasanya mengenai lokasi pembangunan sesuai dengan pemetaan swadaya yang telah dilakukan sehingga mengetahui dimana lokasi yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perbaikan jalan lingkungan dan perbaikan saluran drainase lingkungan, indikatornya dapat dilihat pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam musyawarah penentuan program, identifikasi dan masalah ataupun pembuatan program tersebut seperti:<sup>8</sup>

- a. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat aktif ikut memberikan ide dalam musyawarah tersebut. Ide tersebut berupa sasaran yang tepat untuk menempatkan suatu perencanaan program

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 10 Juli 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 5 Mei 2018.

tersebut. Misalnya menentukan lokasi penanganan prioritas program KOTAKU.

- b. Beberapa warga menyumbangkan konsumsi seperti makanan ringan dan air mineral dalam musyawarah tersebut. Beberapa warga lain hanya diam menunggu keputusan tersebut.

Berdasarkan wawancara tersebut, bisa dilihat masyarakat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan program agar terciptanya suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat Krobokan. Diukur dari bentuk partisipasi, masyarakat berada pada partisipasi vertikal. Karena masyarakat terlibat memberi gagasan dan saran dalam suatu perencanaan program yang akan dijalankan. Tidak sedikit pula masyarakat yang berada di posisi partisipasi horizontal, yang artinya masyarakat hanya diam dan menunggu hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan pada Program KOTAKU**

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keikutsertaan seseorang pada tahap pelaksanaan

pekerjaan suatu proyek konstruksi. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang maupun material bangunan serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhkan dalam tahapan ini agar dapat menghasilkan keberhasilan dari suatu program pembangunan, partisipasi masyarakat disini sangat berat, dimana masyarakat dalam pelaksanaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih baik. Pernyataan Ibu Retno Setyaningsih sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Tidak semua masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan tersebut dikarenakan memang masyarakat disini punya urusan kegiatan masing-masing ada yang kerja buruh dan pegawai, disitu pula kita tidak bisa memaksa mereka untuk meminta bantuannya. Tapi mbak, biasanya setiap hari minggu masyarakat ikut berpartisipasi semuanya.”

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Retno Setyaningsih pada tanggal 23 April 2018.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting mengingat masyarakat yang nantinya akan menggunakan hasil pembangunan tersebut, namun masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dikarenakan mereka mempunyai kesibukan yang sangat penting dalam mencari nafkah.

Namun, bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan beralasan mempunyai kesibukan masing-masing dan tidak tahu masalah program pembangunan tersebut, mereka yang tidak ada waktu ikut berpartisipasi memberikan bantuan berupa makanan dan minuman yang dapat kita lihat hasil wawancara dengan ibu Samiasih sebagai berikut:<sup>10</sup>

“ Yang bisa saya lakukan hanya membuatkan mereka minum, belikan gorengan paling itu saja sih yang bisa saya berikan mbak. Kalau ikut kerja saya tidak bisa karena saya dan suami saya kerja.”

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Samiasih pada tanggal 27 April 2018.

Temuan peneliti di atas, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Titik selaku Manager BKM Arta Kawula. Beliau menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Kami dari BKM Arta Kawula, Lurah, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa turut terlibat dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Meskipun demikian, tidak semua dari kami ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan konstruksi namun dibagi yang menyajikan makanan dan minuman, dan ada juga yang ikut hanya dalam persiapan pelaksanaannya saja mbak.”

Masyarakat menyadari bahwa pelaksanaan program KOTAKU ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk kebaikan lingkungan masyarakat ini. Sehingga antusias dan ikut serta dalam pelaksanaan program sangatlah besar. Menurut

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 27 April 2018.



Bapak Mulyanto selaku seksi pembangunan di wilayah RW 7 menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Kalo dalam proses kontruksi dari RW 7 sih semua masyarakat saya wanti-wanti untuk mengikuti mbak, karena biar pekerjaan pembangunannya bisa cepet terselesaikan.”

Dari hasil wawancara di atas, tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dapat berupa tenaga, uang maupun makanan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, warga masyarakat aktif sebagai pelaksana maupun pemanfaatan program. Adapun bentuk dari partisipasi ini adalah warga sibuk bergotong royong dalam pelaksanaan program ini, masyarakat mempunyai tugasnya masing-masing ada yang membawa adukan semen, membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Adapula masyarakat yang menyumbangkan materi berupa konsumsi, sajian makan siang untuk masyarakat yang sedang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyanto pada tanggal 27 April 2018.

bergotong royong pelaksanaan kontruksi. Adapula masyarakat yang sibuk mengatur jalannya program tersebut berupa gagasan atau pemikiran.

Partisipasi masyarakat Kelurahan Krobokan mempunyai bentuk yang fungsional. Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan dan secara bertahap menunjukkan kesadarannya bahwa pentingnya berpartisipasi dalam sebuah pembangunan untuk kebaikan masyarakat sendiri dan BKM selalu mensosialisasikan dan mengajak warag Krobokan yang belum berpartisipasi, seperti kata Ibu Titik selaku Manager BKM Arta Kawula Krobokan:<sup>13</sup>

“Dalam menjalankan sebuah program saya biasanya dan masyarakat yang terlibat selalu mensosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk ikutserta dalam membangun kampung sendiri, kalau bukan kita yang menjaga dan membangun siapa lagikan? Dan selahi ada yang mau memfasilitasi dari KOTAKU, tinggal

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Titik pada tanggal 5 Mei 2018.

kesadaran diri kita yang perlu dikembangkan gitu.”

Dilihat dari bentuk partisipasinya masyarakat berada pada kondisi vertikal, dimana masyarakat sudah melakukan tanggung jawabnya dan melakukan kinerjanya yang baik dalam suatu program tersebut dan masyarakat mengikuti arahan yang disarankan fasilitator penyedia layanan program tersebut. Dalam bentuk partisipasinya masyarakat dalam program tersebut, diantaranya adalah faktor usia. Dimana faktor usia ini mempengaruhi kinerja masyarakat dalam tahap pembangunan ini, di usia masyarakat yang sudah cukup tua tenaga yang disumbangkannya tidak begitu maksimal karena masyarakat yang umurnya sudah cukup tua akan cepat lelah dalam melakukan pembangunan ini. Kemudian dari faktor jenis kelamin hanya kaum laki-laki saja yang mempunyai tugas berat dalam pembangunan seperti menyumbangkan tenaganya sementara para kaum perempuan hanya bertugas menyiapkan konsumsi.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi pada Program KOTAKU**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh UPL (Unit Pengelola Lingkungan) BKM Arta Kawula sudah sesuai dengan standar dari bistek yang ada di proposal, mulai dari segi material, rencana bentuk bangunan sampai dengan jalannya pelaksanaan pembangunan. Menurut pantuan yang dilakukan BKM Arta Kawula, perbaikan saluran drainase dan perbaikan jalan sehat sudah berhasil sesuai dengan standar pemerintah.

Wawancara dengan Bapak Mulyanto sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Kepingin saya lebih diratakan lagi, inikan jalannya terlalu tinggi dan juga tidak rata cuman lihat pinggirnya itu masih bolong-bolong mbak, jadi kepengennya sih rata sampai kedepan dirapikan sampai yang bolong itu tertutup semua.”

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyanto pada tanggal 27 April 2018.

Hal lain di ungkapkan juga oleh Ibu Sri, sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Sebenarnya tiap masyarakat ikut mengevaluasi Program pembangunan ini mbak, kemudian evaluasi itu di tampung oleh RT/RW yang kemudian dirembuk lagi melalui rapat yang diadakan oleh Kelurahan Krobokan yang didampingi fasilitator.”

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat boleh manghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Selain itu, semakin sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu akan lebih baik. Khusus untuk BKM Arta Kawula diharuskan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan sebagai laporan pertanggung jawaban. Berikut adalah penjelasan Bu Titik:<sup>16</sup>

“Masyarakat boleh saja mengawasi tapi sangat di khususkan untuk BKM karna

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 27 April 2018.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bu Titik pada tanggal 27 April 2018.

yang tau persis perkembangannya, kalau masyarakat mau setiap haripun mereka mengawasi malah jauh lebih baik mbak. Dan RT/RW setempat yang sangat diwajibkan dalam hal pengawasan. Kalau seumpama hasilnya gak bagus kan RT/RW nya juga kena komplain dari warganya mbak. Selama ini RT/RW setempat, BKM dan didampingi fasilitator aktif mengawasi, masyarakat sekitar palingan Cuma liat-liat udah gitu aja. Kalau rapat evaluasi ada di musyawarah yang di adakan pihak Kelurahan Krobokan”.

Menurut Ibu Mukayyah adalah sebagai berikut:

“Jalankan awalnya berlubang terus ada bantuan dari pemerintah untuk perbaikan. Ternyata perbaikannya bukan nutupin lubang nya tapi langsung dipasang paving. Setelah dipaving ternyata jalan lebih tinggi dari rumah dan efeknya air masuk ke halaman rumah. Evaluasinya gini mbak,

kalo mau memperbaiki jalan tapi yo jangan ditinggikan juga. Kan kasihan rumah saya kalo hujan airnya takut masuk rumah.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mukayyah, hasil dari evaluasinya adalah kurang efektifnya peninggian jalan karena dapat dikhawatirkan ketika hujan turun maka air akan masuk ke rumah warga yang posisi rumah lebih rendah dari pada jalan.

#### **4. Partisipasi Masyarakat dalam Menikmati Hasil pada Program Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Pada tahap partisipasi pelaksanaan ini masyarakat memperoleh hasil dari program KOTAKU yang telah dibuat, tahap menikmati hasil ini merupakan perwujudan dalam partisipasi. Pada tahap ini dengan melibatkan masyarakat pada tahap menikmati hasil Program KOTAKU tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga untuk memelihara bangunan yang telah dibuat. Dan keikutsertaan masyarakat untuk menjaga, merawat serta memanfaatkan dengan

sebagaimana mungkin dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Pemanfaatan ini selain dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga dilihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan yang menjadikan masyarakat dapat mandiri dan mampu untuk meningkatkan keberdayaan mereka dalam meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam hasil pembangunan dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan dapat dilihat dari wawancara dengan fasilitator Program KOTAKU sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Masyarakat disini sudah menjaga lingkungan bersama dengan cara bergotong royong, kalau ada sampah mereka sapu dan kalau hujan deras mereka langsung masuk ke got untuk membersihkan saluran air agar tidak terjadi

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bu Sri pada tanggal 27 April 2018.



genangan atau banjir sesuai dengan kemampuan mereka.”

Hasil wawancara dengan fasilitator KOTAKU dapat diketahui bahwa telah adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk menjaga hasil dari pembangunan yang telah dikerjakan, partisipasi masyarakat ditahap ini sudah meningkat dan menjaga sesuai dengan kemampuan mereka.

Menurut Ibu Samiasih, menjelaskan tentang manfaat dari Program ini yaitu:<sup>18</sup>

“Manfaat yang dirasakan pertama waktu saya naik honda (motor) lewat bisa agak santai dan nyaman. Karena dulunya jalan disini berlobang itu saya was-was mbak, apalagi dulu itu kan saya belum begitu lancar naik hondanya dan sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki. Kedua, dulu waktu selokannya belum di bikin kayak gini, banjir bisa selutut bahkan lebih dan sekarang maksimal tidak sampai 30 cm mbak”.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Samiasih pada tanggal 27 April 2018.

Hal demikian juga dirasakan oleh Bapak Mulyanto:<sup>19</sup>

“Dulu mbak sebelum dibangun kalo saya lagi duduk nyantai di depan rumah sini pas ada motor atau mobil lewat itu debu nya sangat mengganggu apalagi kalau sedang musim angin, yaahh... tambahh paraah tu mbak”.

## **B. Analisis faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat Krobokan**

### **1. Faktor penghambat**

Faktor penghambat program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat sangat kecil, hanya dari segi waktu dan kesiapan yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi. Adapun hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dalam masyarakat itu sendiri (*internal*) yaitu kemampuan dan kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyanto pada tanggal 27 April 2018.

luar masyarakat (*eksternal*) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri. Pelaksanaan program pembangunan drainase dan sanitasi di kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang mempunyai beberapa faktor penghambat diantaranya adalah:

- a. Masih kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat itu sendiri.
- b. Kesibukan masyarakat terhadap pekerjaannya yang menjadikan ketidakhadiran masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
- c. Kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dipungkiri akan mengharapkan imbalan.
- d. Kurang pemahannya masyarakat akan pembangunan yang baik dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri.
- e. Fasilitas kurang memadai.

## 2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung program KOTAKU di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat

Kota Semarang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari peran masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU dilakukan melalui:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dapat dilihat dalam beberapa ketelibatan seperti: Masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi pembangunan, kehadiran dalam rapat serta menyumbang gagasan atau ide.
  - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, dapat dilihat dalam beberapa keterlibatan masyarakat seperti: Masyarakat terlibat dalam kontribusi tenaga dalam pembangunan proyek, sebagian yang lain masyarakat berkontribusi dalam biaya, memberikan makanan dan

minuman untuk masyarakat yang terlibat dalam pembangunan proyeknya.

- c. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi, dapat dilihat dalam beberapa keterlibatan masyarakat seperti: Masyarakat terlibat dalam monitoring pelaksanaan program serta Masyarakat mengevaluasi masalah-masalah yang timbul. Masalah yang timbul ketika perbaikan jalan dengan cara meninggikan jalan membuat warga takut jika hujan airnya akan mengalir ke rumah warga.
- d. Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil, dapat dilihat dalam beberapa keterlibatan masyarakat seperti: masyarakat merasa nyaman dan santai ketika jalan di jalanan yang sekarang sudah bagus dan rata serta masyarakat tidak perlu khawatir jika ada hujan deras maka debit airnya tidak sebanyak dulu ketika belum diperbaiki.

- 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang antara lain:

- a. Faktor pendukung adalah Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program.
- b. Faktor penghambatnya adalah Masih kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat, masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Kurang pahamiannya masyarakat akan pembangunan yang baik, kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri dan Fasilitas kurang memadai.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari uraian, kiranya penulis memberikan beberapa saran sebagai sumber pemikiran sebagai berikut:

1. Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan harus lebih ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan, baik mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hingga pemanfaatan hasil serta pemeliharaan.

2. Musyawarah Kelurahan merupakan suatu forum bagi masyarakat dalam merencanakan apa yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur, jadi pemerintah harus selalu memperhatikan setiap hasil musyawarah karena di dalamnya terdapat seluruh aspirasi masyarakat dalam merealisasikan dalam bentuk program-program pembangunan.

### **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan keridhoan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini memberi kemanfaatan bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, dan semoga Allah senantiasa memberi rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Putra Siregar. Robert Tua Siregar. “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalumun Provinsi Sumatra Utara”, dalam *Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 2 edisi Agustus 2015*.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dadan Rohimat. Rita Rahmawati. G. Goris Seran. “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program KOTAKU/PNPM di Kecamatan Ciawi” dalam *Jurnal Governasi Vol. 3 No. 2*
- Direktorat Jendral Cipta Karya. 2010. *Bersama Membangun Kemandirian*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Dwiningrum. Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Fadjar Judiono, “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana jalan, Studi kasus peningkatan jalan di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom

Kabupaten Nganjuk” dalam *Jurnal Wacana Vo. 12 No. 3 Juli 2009*.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hadi Suroso. Abdul Hakim. Irwan Noor. “Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik” dalam *Jurnal Wacana Vol.17 No.1 pada tahun 2017*.

Hamka. 2015. *Tafsir Al Ahzar*. Depok: Gema Insani.

Hafidzita Eka Putri Irvan. “Partisipasi masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru”. dalam *jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1*

Husaini, Usman. Akbar Seia Purnomo. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kamaluddin. “Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam” Dalam *Jurnal Konsep Dasar dan Arah Pengembangan. Vol. VIII. No. 02. Juli 2014*.

Kamus besar Bahasa Indonesia dalam [KamusBahasaIndonesia.org](http://KamusBahasaIndonesia.org). diakses pada 12 Maret 2018

Kartini Kartono. 1997. *Metodologi Reasearch Sosial*. Bandung.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2016. *Pedoman  
Umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Jakarta.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2016. *Petunjuk  
Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat  
Desa/Kelurahan*. Jakarta.

Lex J Moeloeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.  
Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya.

Mardikanto, Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam  
Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

M. Idrus. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial:  
Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta:  
UII Press.

Ndhara, Taliziduhu. 2008. *Pembangunan Masyarakat*.  
Jakarta: PT Rinka Cipta.

Prof.Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma, Dr. Santi Rande, Sahria  
Apriliana. Partisipasi Masyarakat dalam Program  
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dalam *eJurnal  
Administrasi Negara, Vol.6, No.1 2018*.

Rukminto Adi, Isbandi. 2003. *Intervensi Komunitas  
Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya  
Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Sahria Apriliana. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan  
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi

Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan”dalam *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 1.

Soetomo. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Solekhan,Muchamaad. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Malang: Setara Press.

Sjafari, Agus. Sumaryo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Serang: Fisip Unntirta Press.

Sugiyono. 2003. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfa Beta.

Sri Yuniani, Gusty Putri Dhini Rosyida.“Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surabaya”dalam *Jurnal Wacana Publik Vo. 1 No. 2* Tahun 2017.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutrisna,Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Theresia, Aprilia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Undang-undang dasar tahun 1945

WijayaantiKurnia, Sjamsiar Sjamsudin, Mochamad Rozikin, "Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat" dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 10.

Wawancara dengan Ali Ahwan selaku pegawai Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat pada Tanggal 28 Maret 2018

Wawancara dengan Dwi Pujiastuti selaku pegawai Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat pada Tanggal 28 Maret 2018

Wawancara dengan Bu Titik selaku Manager BKM Arta Kawula pada Tanggal 28 Maret 2018

Wawancara dengan Pak Mulyanto selaku seksi pembangunan pada tanggal pada tanggal 23 April 2018

Wawancara dengan Bu Mukayah selaku pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada tanggal 23 April 2018

Wawancara dengan Bu Sri selaku Fasiliator Program KOTAKU pada 27 April 2018

Wawancara dengan Ibu Retno Setyaningsih selaku Sekertaris Kelurahan Krobokan pada tanggal 23 April 2018.

Wawancara dengan Bu Samiasih selaku masyarakat Kelurahan Krobokan pada tanggal 23 April 2018

Wawancara dengan Pak Tohar Selaku Unit Pengelola Lingkungan pada 27 April 2018

[Http://JawaPos.com/2017/9/13/partisipasi-program-KOTAKU](http://JawaPos.com/2017/9/13/partisipasi-program-KOTAKU) diakses pada 16 Maret 2018

<http://KOTAKU/Tentang-KOTAKU> diakses pada 16 Maret 2018

## Dokumentasi



**Rembuk pemetaan swadaya di BKM Arta Kawula Krobokan**



**Rancangan Program KOTAKU di Krobokan**





**Rapat Warga Tahunan di Kelurahan Krobokan**



**Pelatihan Relawan Kel. Krobokan oleh KOTAKU**





**Proses Pelaksanaan Perbaikan Jalan oleh KOTAKU**



**Proses Perbaikan Saluran Drainase**



**Proses Monitoring**



**Proses Evaluasi oleh Tim KOTAKU, Fasilitator dan Pihak Kel. Krobokan**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor. 145/105

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samiyono, SH.  
Jabatan : Lurah Krobokan

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa dibawah ini:

Nama : Afwah Ulya  
NIM : 131411011  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Walisongo Semarang yang benar-benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan judul penelitian "Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar-benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juli 2018



**SURAT KETERANGAN**

Nomor. 145/105

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samiyono, SH.  
Jabatan : Lurah Krobokan.

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa dibawah ini:

Nama : Afwah Ulya  
NIM : 131411011  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Walisongo Semarang yang benar-benar telah melakukan penelitian di BKM ARTA KAWULA Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan judul penelitian "Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar-benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juli 2018

